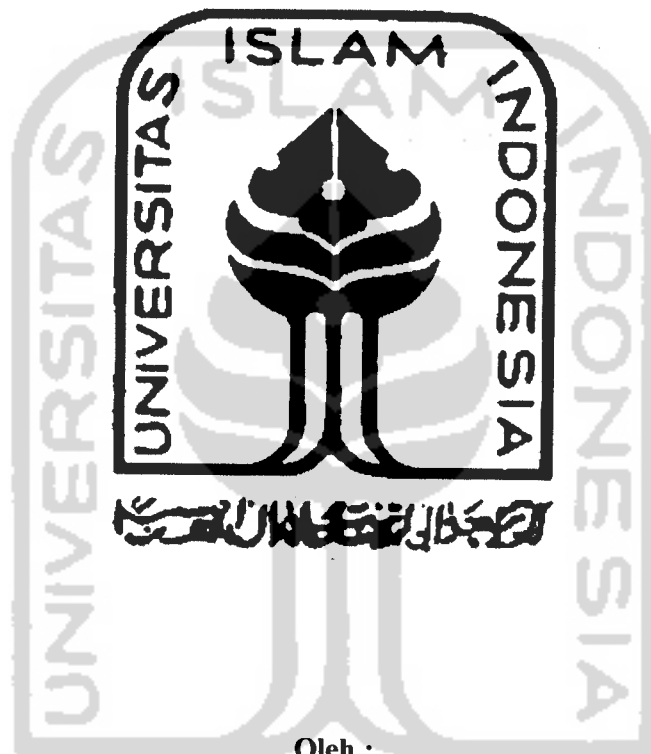


Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pengeluaran

Pembangunan Di Kabupaten Bantul

(periode 1988-2002)

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Hendrawan

Nomor Mahasiswa : 02313111

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2006

**Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pengeluaran
Pembangunan Di Kabupaten Bantul
(periode 1988-2002)**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang srata I
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Hendrawan
Nomor Mahasiswa : 02313111
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

2006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, Agustus 2006

Penulis,

Hendrawan

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

"Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pengeluaran Pembangunan Di Kabupaten Bantul (1988 - 2002)

Disusun Oleh: HENDRAWAN
Nomor mahasiswa: 02313111

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 19 September 2006

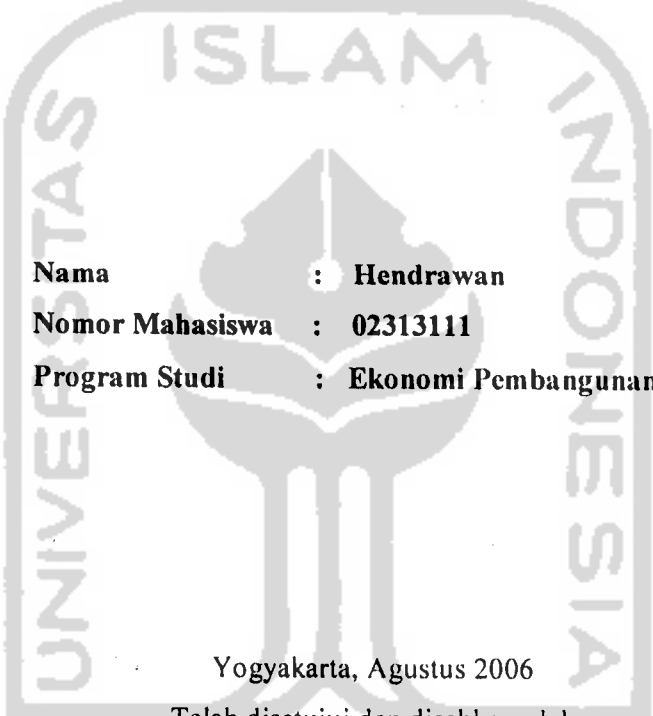
Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Diana Wijayanti, M.Si

Penguji I : Drs. Suharto, M.Si

Penguji II : Drs. Akhsyim Afandi, MA

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Anwar Ishak, M.Bus, Ph.D

PENGESAHAN**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran
Pembangunan Di Kabupaten Bantul
(periode 1988-2002)**

Nama : Hendrawan
Nomor Mahasiswa : 02313111
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Agustus 2006

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing,



Dra. Diana Wijayanti, M.Si

Motto

Benda pertama yang diciptakan oleh Allah SWT adalah mutiara yang cemerlang, yang dinamainya ('Aql). Mutiara ini Ia beri 3 sifat, yaitu :

- √ Kemampuan untuk mengenal Tuhan, kemampuan ini menimbulkan Busn yang melahirkan keindahan
- √ Kemampuan untuk mengenal Dirinya Sendiri, kemampuan ini menimbulkan Isyq yang melahirkan Cinta
- √ Kemampuan untuk mengetahui yang belum ada, kemampuan ini melahirkan Ilmu

(Syaik Al-Isyraq, 1991: 79-80)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. "

(Qs Al-Mujadalah, ayat 11)

"Katakanlah! Adakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. "

(Qs Az-Zumar, ayat 9)

"Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang – orang yang tidak mempergunakan akalnyanya.

(Qs Yunus, ayat 100)

"Katakanlah ' jika kamu (benar – benar) mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa – dosa mu "

(Qs Al – Imran ayat 31)

" Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasullullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah

(Qs Al- Ahzab ayat 21)

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim....

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah AWT, yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan karuniaNya serta kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ***Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pengeluaran Pembangunan Di Kabupaten Bantul (Periode 1988-2002)*** ”. Skripsi ini secara garis besar memuat tentang pengaruh redistribusi daerah, laba BUMD, PDRB dan Inflasi serta kebijakan otonomi daerah terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu tiada yang pantas penulis haturkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Diana Wijayanti, Msi, Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Drs. Jaka Sriyana, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.

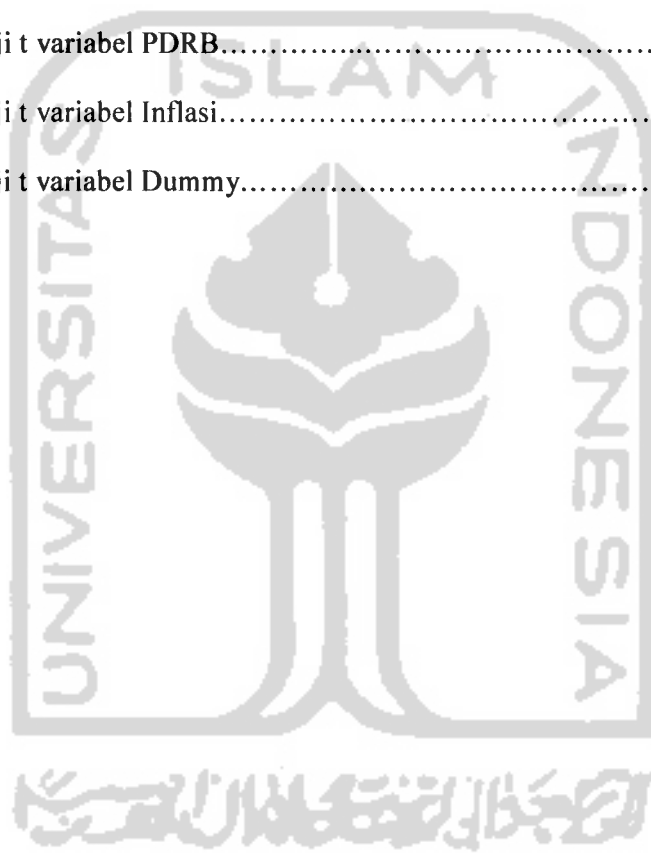
DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Halaman Daftar Isi	vii
Halaman Daftar Tabel	xi
Halaman Daftar Gambar	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiii
Halaman Abstraksi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Manfaat Dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Manfaat Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Sistematikan Penulisan	7

5.2.3. Uji Statistik	63
5.2.4. Pengujian Asumsi Klasik	65
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	69
6.1. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis	69
6.1.1. Pemilihan Model regresi	69
6.1.2. Hasil Regresi	72
6.1.3. Koefisien Determinasi (R^2)	73
6.1.4. Pengujian t- Statistik	73
6.1.5. Pengujian F Statistik	79
6.2. Pengujian Asumsi Klasik	80
6.2.1. Multikolinieritas	80
6.2.2. Autokorelasi	81
6.2.3. Heteroskedstisitas	82
6.3. Pembahasan Hasil Analisis.....	84
BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI	90
7.1. Kesimpulan	90
7.2. Implikasi	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

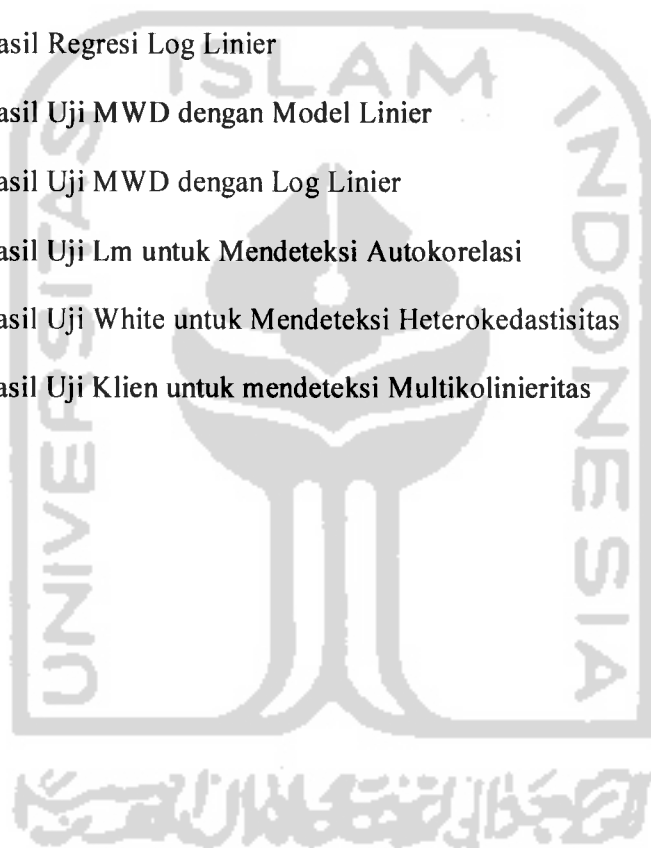
Gambar	Halaman
5.1. Statistik Durbin-Watson d	66
6.1. Kurva Uji t variabel Restribusi Daerah.....	75
6.2. Kurva Uji t variabel Laba BUMD.....	76
6.3. Kurva Uji t variabel PDRB.....	77
6.4. Kurva Uji t variabel Inflasi.....	78
6.5. Kurva Uji t variabel Dummy.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I. Data Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, Restribusi Daerah, Laba BUMD dan Inflasi serta dummy Variabel Kebijakan Otonomi Daerah. (periode 1988-2002)
- II. Hasil Regresi Linier
- III. Hasil Regresi Log Linier
- IV. Hasil Uji MWD dengan Model Linier
- V. Hasil Uji MWD dengan Log Linier
- VI. Hasil Uji Lm untuk Mendeteksi Autokorelasi
- VII. Hasil Uji White untuk Mendeteksi Heterokedastisitas
- VIII. Hasil Uji Klien untuk mendeteksi Multikolinieritas



Abstraksi

Pembangunan di Indonesia tidak hanya dilaksanakan ditingkat pusat tetapi juga dilaksanakan di tingkat regional atau daerah sebab pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Peran serta daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menekankan pada pengertian otonomi daerah yaitu suatu hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan pula untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintah guna melayani masyarakat serta kelancaran pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan otonomi daerah tentu membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran daerah. Oleh sebab itu keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga. Segala kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah membutuhkan biaya. Semakin besar dana yang tersedia maka semakin besar pula kegiatan yang dilaksanakan. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bantul sangat pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya gedung-gedung yang

didirikan, perbaikan-perbaikan jalan sebagai prasarana transportasi, perubahan hasil pertanian yang selalu cenderung meningkat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Bantul pun sangat menunjang pembangunan disegala bidang yang sedang dilaksanakan. Pengeluaran yang dilakukan untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diperoleh dari pendapatan asli daerah sangat mempengaruhi pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul. Apabila Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat maka diharapkan Kabupaten Bantul dapat memperkecil kergantungan terhadap subsidi atau bantuan bagi pembangunan dari pemerintah pusat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Restribusi Daerah, Laba BUMD, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi serta Otonomi Daerah berdampak positif signifikan terhadap pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul.

Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pembangunan dalam penyelenggara pemerintah guna melayani masyarakat serta kelancaran pembangunan daerah. Diharapkan Anggaran belanja pembangunan dapat berperan mempercepat proses stabilisasi dan reformasi struktural, mengingat dalam masa krisis ekonomi dewasa ini sektor masyarakat dan dunia usaha (swasta) belum mampu menjadi lokomotif kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan itu, dilaksanakan penajaman prioritas alokasi, penundaan proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum mendesak, serta penyediaan tambahan anggaran untuk meningkatkan peranan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Ditengah kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, peranan dan kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkat selaras dengan pembangunan nasional, serta mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Garis – garis Besar Haluan Negara antara lain telah mengamanatkan sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah perlu ditingkatkan kemampuan membangun daerah. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu sehingga akan mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan nasional berwawasan nusantara, serta pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.

Pembangunan di Indonesia tidak hanya dilaksanakan ditingkat pusat tetapi juga dilaksanakan di tingkat regional atau daerah sebab pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Peran serta daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah diatur dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Undang – undang tersebut menekankan pada pengertian otonomi daerah yaitu suatu hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk

memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan pula untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintah guna melayani masyarakat serta kelancaran pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka daerah perlu diberikan wewenang dalam melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Selanjutnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, pemikiran otonomi kepada daerah merupakan pertimbangan yang tepat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan otonomi daerah tentu membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran daerah. Oleh sebab itu keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga. Segala kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah membutuhkan biaya. Semakin besar dana yang tersedia maka semakin besar pula kegiatan yang dilaksanakan. Demikian sebaliknya semakin baik pengelolaan keuangan maka semakin berguna uang yang dipakai.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Manullung yaitu "Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Makin baik keuangan suatu negara maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah. Keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus

rumah tangga daerah. Pendapat yang sama sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah untuk mengatur kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dikemukakan oleh Pamudji yaitu “ pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan oleh karena itu keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka untuk menciptakan suatu daerah yang baik dan dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan. Keadaan tersebut akan memperluas kesempatan dan potensi daerah Kabupaten untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia selain mengenal sistem desentralisasi, juga mengenal sistem dekonsentrasi. Sistem dekonsentrasi mengandung pengertian administrasi daerah dan fungsi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Hubungan tak terpisahkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat seringkali menimbulkan persoalan dalam penerimaan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatannya tergantung pada bantuan dan pinjaman pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan pemerintahan dihadapkan pada masalah keterbatasan dana. Untuk itu setiap daerah sudah selayaknya berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada. Undang-

undang otonomi daerah, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 32 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 33. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi (Ismail, 2002). Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari (Kuncoro, 2004):

- (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- (b) Dana Perimbangan,
- (c) Pinjaman daerah dan
- (d) Lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat).

Penerimaan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yaitu:

- (a). Pajak Daerah
- (b) Restribusi Daerah,
- (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
- (d) Lain-lain pendapatan yang sah.

Pembangunan yang dilakukan di Daerah Tingkat II Bantul sangat pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya gedung-gedung yang didirikan, perbaikan-perbaikan jalan sebagai prasarana transportasi, perubahan hasil pertanian yang selalu cenderung meningkat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Potensi yang

dimiliki daerah Kabupaten Bantul pun sangat menunjang pembangunan disegala bidang yang sedang dilaksanakan. Pengeluaran yang dilakukan untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul diperoleh dari pendapatan asli daerah sangat mempengaruhi pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul. Apabila Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat maka diharapkan Kabupaten Bantul dapat memperkecil kergantungan terhadap subsidi atau bantuan bagi pembangunan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul “**Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pengeluaran Pembangunan Di Kabupaten Bantul (periode 1988-2002) ”**”.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang dikemukakan diatas maka pokok-pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul?
2. Seberapa besar pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul?
3. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul?
4. Seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul?
5. Seberapa besar pengaruh kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan terhadap Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul?

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Bab ini memuat uraian atau gambaran umum atas subyek penelitian yang diambil dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai gambaran secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama.

BAB IV. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi dua bagian: *pertama*, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang

penulis pilih. *Kedua*, hipotesis merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB V. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan penjelasan satu pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistik.

BAB VII. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi yang muncul dari hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat ditarik benang merah apa implikasi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. Keadaan Geografi

Berdasarkan data yang diperoleh dikantor Statistik, Dati II Bantul merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|--------|
| a. Wilayah Pembantu Bupati | : 13 |
| b. Kecamatan | : 17 |
| c. Desa | : 75 |
| d. Dusun | : 935 |
| e. RW | : 2311 |
| f. RT | : 5483 |

Kabupaten Dati II Bantul terletak diantara :

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| - Bujur Timur | : 110° , 18' . 40' , 110° , 34' , 40' |
| - Lintang Selatan | : 7° , 46' , 04' , 81' , 00' , 28' |

Kabupaten Dati II Bantul terletak dibagian selatan Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas – batas sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|--|
| a. Sebelah Utara | : Kodya Yogyakarta / Kab Dati II Sleman. |
| b. Sebelah Timur | : Kab Dati II Gunung Kidul. |
| c. Sebelah Selatan | : Lautan Indonesia. |
| d. Sebelah Barat | : Kabupaten Dati II Kulon Progo. |

Wilayah Kabupaten Dati II Bantul meliputi areal seluas 50.685 Ha (506.85 Km²), yang terdiri dari :

- Tanah Sawah : 17.676 Ha
- Tanah Tegalan : 6.008 Ha
- Pekarangan : 19.047 Ha
- Hutan : 0.933 Ha
- Lain – Lain : 6.941 Ha

2.2. Restribusi Daerah

Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha yang berkepentingan atau karena langsung diberikan oleh daerah. Di Kabupaten Dati II Bantul yang termasuk restribusi daerah yaitu uang leges, dispensasi jalan, pemeriksaan jalan, sewa rumah potong hewan, industri kecil, rumah sakit, wisata dan lain – lain. Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa pendapatan restribusi daerah kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Misalnya saja untuk tahun 1993 besarnya penerimaan pendapatan dari restribusi daerah adalah sebesar Rp 1.835,428 juta meningkat menjadi Rp 2.041,369 juta pada tahun 1994. Namun untuk kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2002 sebesar Rp 12.219,621 juta dari tahun sebelumnya Rp 8.467,348 juta pada tahun 2001. Untuk lebih jelasnya data mengenai perkembangan restribusi daerah dapat dilihat secara lengkap pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Penerimaan Restribusi daerah
Kabupaten Bantul Th 1993 – 2002 (Juta Rupiah)

Tahun	Restribusi Daerah
1993	1835,428
1994	2041,369
1995	2300,998
1996	2753,616
1997	3424,407
1998	3505,459
1999	4910,778
2000	4755,671
2001	8467,348
2002	12219,621

Sumber data : BPS, Yogyakarta (data diolah)

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pos penerimaan restribusi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2.3. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah yang dimaksud disini adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk perkembangan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah. Jenis pemasukan dari Bagian Laba Perusahaan di Kabupaten Dati II Bantul yaitu antara lain Bank Pembangunan Daerah, PD Air Minum, PD Bank Pasar, dan PD Aneka Dharma.

Tabel 2.2

Perkembangan Penerimaan Laba BUMD

Th 1993 – 2002 (Juta Rupiah)

Tahun	Laba BUMD
1993	108,046
1994	107,612
1995	213,351
1996	351,079
1997	423,124
1998	398,182
1999	584,786
2000	644,093
2001	974,168
2002	3075,864

Sumber data : BPS, Yogyakarta (data diolah)

Pada tabel 2.2 diatas dapat lihat bahwa dari tahun ketahun jumlah Laba BUMD kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Misalnya saja pada tahun 1994 sebesar Rp 107,612 juta meningkat menjadi Rp 213,351 juta. Namun kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2002 sebesar Rp 3.075,864 juta dari tahun sebelumnya tahun 2001 sebesar Rp 974,168 juta.

2.4. Produk Domestik Regional Bruto

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.

Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup Kabupaten dan kota adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kabupaten/ kota menurut lapangan usaha. Produk Domestik Regional Bruto merupakan pendapatan atas dasar faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah/daerah ditambah penduduk asing yang berada di wilayah/daerah tersebut.

Pada tabel 2.3 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 1993 yang diperlihatkan dengan naiknya Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan sebesar Rp 701,668 juta menjadi Rp 779,734 juta pada

tahun 1994 atau mengalami kenaikan sebesar 11,12 % dari tahun sebelumnya. PDRB kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan terbesar terjadi antara tahun 1997 dan tahun 1998 Pada tahun 1997 besarnya PDRB adalah Rp 962,669 juta, meningkat menjadi Rp 1.472,814 juta pada tahun 1998 atau mengalami pertumbuhan 52,99 %.

Tabel 2.3
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993
Kabupaten Bantul Th 1993 – 2002 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB	(%)
1993	701,668	-
1994	779,734	11,12
1995	831,728	6,6
1996	882,318	6,08
1997	962,669	9,01
1998	1472,814	52,99
1999	1717,65	16,62
2000	1874,626	9,13
2001	2015,131	7,49
2002	2161,393	7,25

Sumber data : BPS, Yogyakarta (data diolah)

Walaupun terjadi peningkatan jumlah PDRB pada tahun 1998 sebesar Rp 1.472,814 juta menjadi Rp 1.717,65 juta rupiah pada tahun 1999. Namun, adanya kenaikan jumlah PDRB tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan

dengan kenaikan antara tahun 1997 dengan tahun 1998. Bahkan jika dilihat dari presentase cenderung mengalami penurunan dari 52,99 % menjadi 16,2 %. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel 2.3 diatas.

2.5. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Dati II Bantul dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan setiap tahun anggaran pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Dati II Bantul selalu mengalami peningkatan. Pembangunan yang pesat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dati II Bantul. Pengeluaran pembangunan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Misalnya saja, pada tahun 1993 pengeluaran pembangunan sebesar Rp 10.439,522 juta meningkat menjadi Rp 11.982,397 juta pada tahun 1994 atau meningkat 14,77 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun terjadi peningkatan jumlah pengeluaran pada tahun 1994 sebesar Rp 11.982,397 juta menjadi Rp 12.609,694 juta pada tahun 1995.

Namun, adanya kenaikan jumlah pengeluaran pembangunan tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kenaikan presentase dari tahun sebelumnya, bahkan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan kenaikan pengeluaran pembangunan terbesar, terjadi setelah diberlakukannya otonomi daerah. Kenaikan tersebut mencapai 71,21 persen. Dimasa otonomi daerah, kabupaten Bantul dituntut kemandiriannya untuk berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada untuk membangun kabupaten Bantul yang

nantinya bisa mengembangkan perekonomian. Oleh karena itu memerlukan pengeluaran yang cukup besar. Supaya lebih jelas lihat tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4

Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Bantul

Th 1993 – 2002 (Juta Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pembangunan	(%)
1993	10.439,522	-
1994	11.982,397	14,77
1995	12.609,694	5,23
1996	13.124,975	4,08
1997	16.914,324	28,87
1998	17.363,486	2,65
1999	20.487,735	17,99
2000	25.014,635	22,09
2001	31.372,852	25,41
2002	53.714,783	71,21

Sumber data : BPS, Yogyakarta (data diolah)

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Hasil penelitian *Imron Rosyadi* mengenai “*Hubungan pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota Jambi*” Penelitian ini merupakan kajian terhadap hubungan pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. Tujuan penelitian adalah untuk mengestimasi/menganalisis hubungan pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi selama periode 1979-1998. Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi berdasarkan harga konstan, tanpa minyak dan gas bumi dan Pengeluaran Pembangunan, yang diperoleh dari Kantor Bappeda Kota Jambi, Bagian Keuangan Sekretariat Kota Jambi dan Biro Pusat Statistik Kota Jambi serta Departemen Tenaga Kerja Kota Jambi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda diestimasi dengan regresi kuadrat terkecil (OLS) dan menerapkan model kausalitas koreksi kesalahan (ECM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat pola hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan. Dalam jangka pendek pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Hasil penelitian Miswadi, tentang “*Evaluasi kesesuaian antara pengeluaran pembangunan dengan encana strategis kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau keuangan*”. Penelitian ini tentang evaluasi kesesuaian antara pengeluaran pembangunan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2000-2003. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan atau fluktuasi besarnya anggaran pengeluaran pembangunan pada sektor-sektor yang termuat dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2000 sampai dengan 2003 dan kesesuaiannya dengan Renstra, dan tujuan berikutnya untuk mengetahui kesesuaian antara pengeluaran pembangunan dengan Renstra daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif yaitu *Comparative Budget Statement (CBS)* baik secara horizontal maupun vertikal, dan Korelasi berdasarkan Rangkings (*Rank Correlation*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (*Time Series*) berupa pengeluaran pembangunan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2000-2003, Rencana Strategis (Renstra) tahun 2000-2003, Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Data tersebut diperoleh dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kuantan Singingi dan Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi. Selama periode penelitian menunjukkan hasil bahwa alokasi pengeluaran belanja pembangunan dengan menggunakan analisis *Comparative Budget Statement (BSC)* horizontal, peningkatan tertinggi terjadi tahun 2003 pada sektor perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah dan koperasi, secara absolut(Ab) sebesar Rp5,007

milyar, secara relatif (R1) 1,71 persen. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olahraga tertinggi pada tahun 2002 secara absolut (Ab) sebesar Rp7,112 milyar, secara relatif (R1) 38,20 persen. CBS vertikal, secara proporsional ada 3 sektor pembangunan terbesar mendapat alokasi anggaran yaitu sektor transportasi rata-rata sebesar 36,86 persen sektor aparatur pemerintah dan pengawasan 13,23 persen, dan sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar 10,87persen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pembangunan tahun 2000 sampai dengan 2003 sebanyak 11 (sebelas) sektor (52,4 persen telah sesuai dengan Renstra Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini dapat dilihat dari adanya saling keterkaitan antara sektor-sektor pengeluaran pembangunan yang ada di APBD dengan program sektor yang ada pada Rencana strategis.

Hasil penelitian *Erlangga Agustino*, tentang “*Kinerja keuangan dan strategi pembangunan kota di Era Otonomi Daerah (Studi kasus kota Surabaya)*”. Dipicu dengan adanya krisis moneter dan transisi politik, sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah propinsi sebagai koodinator. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 mengatur desentralisasi

(pelimpahan wewenang dan tanggung jawab) di bidang administrasi dan di bidang politik kepada pemerintah daerah.

Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah dengan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip "*money follows function*" yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999. Tetapi mengingat desentralisasi di bidang administrasi juga berarti transfer personal (Pegawai Negeri Sipil) yang penggajiannya menjadi tanggung jawab daerah, prinsip "*money follows function*", atau sebut saja penggunaan anggaran sesuai fungsinya, tidak mungkin berlangsung. Menurut Lewis (2001), hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber utama pendapatan daerah pada umumnya sebagian besar akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, sehingga anggaran untuk pembangunan menjadi kecil. Siregar (2001:298) mengemukakan bahwa bagi banyak daerah, pengeluaran untuk pembangunan tahun anggaran 2001 (setelah otonomi daerah/desentralisasi) lebih rendah dari pos pengeluaran yang sama tahun anggaran 2000 (sebelum desentralisasi).

Secara umum, penerimaan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dapat bersumber dari pajak (*taxes*), retribusi (*user charges*) dan pinjaman (Musgrave dan Musgrave, 1991: 225). Hal ini secara eksplisit diatur pada pasal 79 UU No. 22/1999. Khusus untuk pinjaman daerah, PP No. 107/2000 telah memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kapasitas keuangan daerah untuk meminjam. Semua pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lewat (dan seijin) pemerintah pusat, baik itu pinjaman dalam negeri maupun pinjaman

luar negeri. Tetapi, meskipun perundang - undangan memperbolehkan daerah melakukan pinjaman, hingga beberapa tahun ke depan hal ini belum diperkenankan oleh pemerintah pusat (dan IMF). Oleh karena itu, sumber pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari redistribusi daerah dan pajak daerah maupun bagi hasil dari pajak dan bukan pajak

Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur adalah kota terbesar kedua di Indonesia. Kota Surabaya memiliki akses pelabuhan jalur kereta api dan bandara internasional yang mendukung perekonomian provinsi Jawa Timur (Dick, 1993b:325-343). Menurut Tampubolon et al (2002) kota besar seperti Surabaya memiliki potensi besar dalam kemandirian finansial, akan tetapi data tahun 2000-2002 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya hanya sekitar 25% dari penerimaan kota Surabaya. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal pemerintah kota Surabaya terhadap Uluran tangan dari Pusat. Selayaknya pemerintah kota Surabaya mengembangkan sumber daya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari Pusat (Bahl, 1999; World Bank, 2003 a; 2003 b). Akan tetapi, beberapa studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah telah menimbulkan distorsi pasar dan *high cost economy* (Saad, Ilyas., 2003). Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah kurang diikuti upaya untuk meningkatkan pelayanan publik (Halim dan Abdullah, 2004). Muncul suatu permasalahan, bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya? Strategi kebijakan apa

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya dan merumuskan strategi kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan di kota Surabaya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Oleh karena itu, pemerintah kota Surabaya perlu meningkatkan penerimaan Sumber daya dan penerimaan kota Surabaya dengan meningkatkan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah, selain pemerintah kota Surabaya perlu mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat lebih menyokong PAD (Pendapatan Asli Daerah).

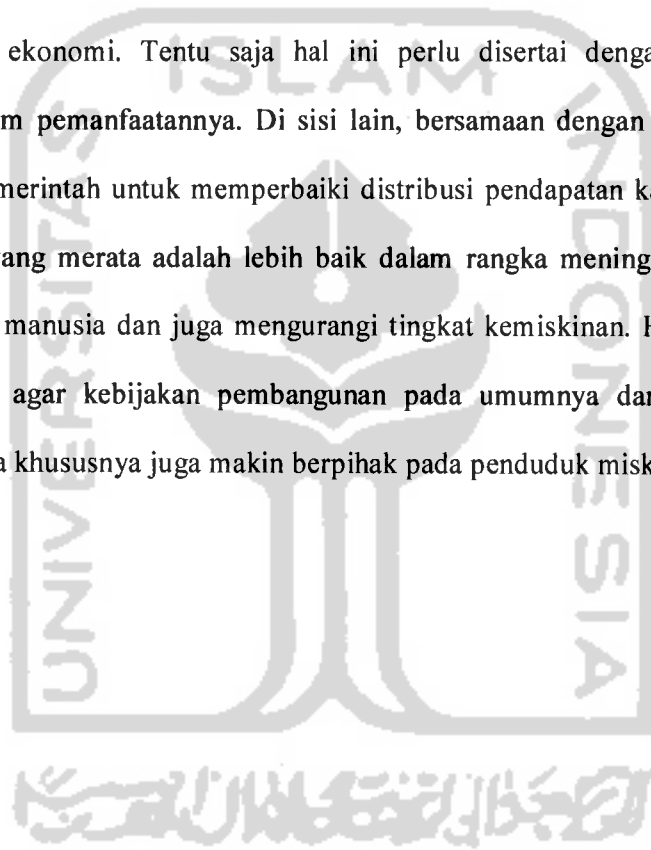
Hasil penelitian *Aloysius Gunadi Brata*, mengenai “*Investasi sektor publik lokal pembangunan, manusia, dan kemiskinan*” menunjukkan Investasi sektor publik untuk bidang pembangunan manusia sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan tingkat kemiskinan. Dewasa ini juga makin kuat kebutuhan bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk makin menaruh perhatian pada pengeluaran sosial tersebut yang komponen utamanya adalah pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan dalam pengeluaran pembangunan. Dalam format anggaran pemerintah di Indonesia, pengeluaran untuk pendidikan ini mencakup sektor pendidikan dan kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga; agama; serta ilmu pengetahuan dan

teknologi. Sedangkan untuk bidang kesehatan mencakup sektor tenaga kerja; kependudukan dan keluarga sejahtera; serta kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja.

Dalam kurun waktu 1996-2002, pengeluaran pembangunan pemerintah, dalam hal ini pemerintah tingkat propinsi, untuk bidang sosial telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan ini dimungkinkan pula dengan makin meingkatnya sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah. Namun demikian alokasi pengeluaran untuk sektor-sektor di luar bidang pendidikan dan kesehatan tersebut masih lebih besar. Sementara dalam hal pembangunan manusia dan kemiskinan, krisis ekonomi telah membawa akibat buruk sehingga capaian pada kedua aspek tersebut bergerak mundur. Bahkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan pada tahun 2002 cenderung masih belum bisa menyamai capaian pada tahun 1996. Dari hasil estimasi dengan menggabungkan data tahun 1996, 1999, dan 2002 diperoleh bukti bahwa investasi sektor publik untuk bidang sosial membawa manfaat bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk. Investasi bidang sosial tersebut menghasilkan manfaat dalam peningkatan IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia yang berhasil juga ditemukan membawa manfaat pada berkurangnya tingkat kemiskinan. Variabel lain yang diintroduksikan, yakni investasi swasta dan distribusi pendapatan secara umum berpengaruh kuat terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan. Investasi swasta berperan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja yang memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan ketimpangan distribusi

pendapatan pendapatan merugikan upaya pengurangan kemiskinan karena yang terjadi justru peningkatan kemiskinan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan maka alokasi pengeluaran pembangunan untuk bidang pendidikan dan kesehatan perlu makin diseimbangkan dengan pengeluaran untuk bidang-bidang lain seperti untuk infrastruktur ekonomi. Tentu saja hal ini perlu disertai dengan peningkatan efisiensi dalam pemanfaatannya. Di sisi lain, bersamaan dengan adalah penting pula bagi pemerintah untuk memperbaiki distribusi pendapatan karena distribusi pendapatan yang merata adalah lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi penting pula agar kebijakan pembangunan pada umumnya dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya juga makin berpihak pada penduduk miskin.



BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengandung pengertian suatu hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemikiran otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II dengan pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Otonomi yang dikehendaki adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata mempunyai pengertian bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan - perhitungan, tindakan – tindakan, dan kebijakan yang benar - benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pemberian otonomi itu benar – benar sejalan dengan tujuan yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok daerah yang tidak bertentangan dengan GBHN, yaitu serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Karena kemampuan keuangan ini merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat otonomi

daerah. Sumber keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan non asli daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah tercapai apabila sumber keuangan daerah yang dapat membiayai aktivitas daerah berasal dari PAD. Sumber – sumber PAD ada lima yaitu : Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Penerimaan Laba BUMD, Penerimaan Dinas – Dinas dan Penerimaan lain – lain.

4.2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Ada berbagai sumber keuangan pemerintah Daerah Tingkat II untuk membiayai pengeluaran daerah yang diperlukan. Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan – kegiatannya antara lain:

1. Dari Pendapatan Asli daerah yang terdiri dari :
 - Pajak Daerah
 - Restribusi Daerah
 - Laba BUMD
 - Penerimaan Dinas – Dinas
 - Penerimaan Lain – Lain
2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
3. Bagian sumbangan dana bantuan.

4.2.1. Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang pokok –

pokok pemerintah di daerah diantaranya menggariskan bahwa sumber – sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut :

4.2.2. Pajak Daerah

Definisi secara umum pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif / istimewa pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang – undang, pungutan dapat dilaksanakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

Pengertian pajak daerah yang dikemukakan oleh K.J Davey yaitu antara lain :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilnya dengan atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan merumuskan pajak daerah sebagai berikut:

“Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang - undang“. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan

kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran daerah. Ciri – ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang - undang atau peraturan hukum lainnya.
- a. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang - undang atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pajak daerah dipergunakan untuk penyelenggaraan daerah sebagai badan hukum publik.

4.2.3. Restribusi Daerah

4.2.3.1. Definisi Restribusi dan Restribusi Daerah

Ada beberapa pengertian tentang restribusi yang penulis gunakan sebagai referensi, antara lain:

1. Pengertian umum restribusi adalah, pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pengertian Restribusi secara umum adalah, pembayaran - pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa - jasa Negara.

4.2.3.2. Retribusi dibagi atas tiga golongan :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial.
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik

4.2.3.3. Sifat Restribusi Daerah

Berdasarkan pada intensifikasi pendapatan daerah dan desa yang disusun oleh BKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Bantul, ada beberapa sifat pendapatan daerah dari pos Restribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Paksaannya bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung ataupun tidak langsung kepada pembayaran Restribusi Daerah.
- c. Walaupun memenuhi syarat materil dan formil, tetapi tetap ada alternatif untuk berkawajiban / mau tidak mau membayar.
- d. Merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgeter tidak menanjak.
- e. Dalam hal tertentu, tetapi dalam banyak hal restribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

4.2.4. Laba Badan Usaha Milik Daerah

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah Laba Badan Usaha Milik Daerah, oleh sebab itu batas – batas tertentu pengolahan perusahaan haruslah bersifat professional dan berpegang pada prinsip ekonomi secara umum yakni efesiensi. Dalam penjelasan umum No. 33 tahun 2004 pengertian perusahaan daerah adalah sebagai berikut “ suatu

Badan Usaha yang dibentuk oleh daerah untuk perkembangan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Dari pengertian tersebut terdapat dua fungsi pokok Badan Usaha yaitu sebagai dinamisator perekonomian dan sebagai penghasilan daerah. Perusahaan daerah diharapkan terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah. UU No. 34 tahun 2004 menjelaskan bahwa sifat perusahaan daerah sebagai berikut :

- a. Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
 1. Memberi jasa
 2. Menyelenggarakan kemampuan umum
 3. Memupuk pendapatan
- b. Tujuan perusahaan adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta keamanan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

4.2.5. Penerimaan Dari Dinas – Dinas

Sumber pendapatan yang lainnya adalah dari dinas - dinas daerah. Dinas - dinas daerah tersebut berfungsi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa memperhatikan untung / rugi tapi dalam batas – batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi dalam bidang pelayanan. Sekalipun dinas - dinas daerah ditempatkan sebagai salah satu sumber PAD, tapi tidak berarti

sumbangan riil yang diberikan sektor ini cukup besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya.

4.2.6. Penerimaan Lain – lain

Penerimaan lain – lain adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah selain yang disebutkan diatas. Penerimaan lain – lain ini merupakan penerimaan daerah yang sah (yaitu dengan peraturan daerah) yang diperoleh dari penjualan – penjualan milik daerah, penjualan barang – barang bekas, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro (kas daerah), biaya pembinaan dan penyewaan tempat lembaga keuangan desa dan lain – lain. Penerimaan lain – lain ini diatur berdasarkan UU No. 34 tahun 2004.

4.3. Konsep Desentralisasi

4.3.1. Desentralisasi

Konsep desentralisasi didefinisikan dalam berbagai pengertian. Pada tahun 1962, PBB mengartikan desentralisasi sebagai :

1. Dekonsentrasi yang disebut juga sebagai desentralisasi birokrasi atau administrasi.
2. Devolusi, yang sering disebut juga sebagai desentralisasi demokrasi atau politik, yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal.

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 18 UUD 1945, desentralisasi mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah harus

melibatkan rakyat. Untuk itu dalam realisasinya pemerintah daerah harus mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan penerapan asas desentralisasi di dalam negara kesatuan adalah agar tidak terjadi pemusatan (sentralisasi) kekuasaan di tangan pemerintah pusat dan agar kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan aspirasi masyarakat di daerah. Secara umum, alasan mengapa desentralisasi itu penting yaitu:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan.
3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
4. Dari sudut kultural, desentralisasi diperlukan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Pada akhir abad ini, desentralisasi telah dilakukan oleh banyak negara, demikian dinyatakan oleh Bank Dunia dalam *Decentralization Briefing Notes*, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin, Afrika dan Asia. Masing-masing negara mempunyai tujuan yang sama namun demikian mereka mempunyai alasan dan motivasi yang berbeda untuk melakukan desentralisasi itu. Alasan ekonomi yang pertama dari desentralisasi adalah alokasi efisiensi. Di mana, keputusan tentang pengeluaran publik yang dibuat oleh pemerintah lebih dekat dan lebih bertanggung jawab dengan permintaan dari daerah, oleh karenanya desentralisasi lebih rasional daripada sentralisasi. Alasan yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan bersaing pemerintah dan mendorong inovasi, oleh karenanya pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan penduduknya. Keuntungan yang lain adalah penduduk menjadi lebih suka untuk membayar kewajiban-kewajibannya untuk prioritas kemauannya, lebih dari itu, masyarakat ikut berpartisipasi memberikan pelayanan. Dalam level makro ekonomi, desentralisasi dapat menimbulkan kebijaksanaan stabilisasi lebih sulit untuk dilaksanakan dan mungkin saja akan menyebabkan ketidakstabilan. Oleh karenanya sistem desentralisasi dapat dirancang untuk menghindari dampak ketidakstabilan dan untuk mendapatkan keuntungan yang tepat. Beberapa kondisi penting keberhasilan desentralisasi dikemukakan dalam *Decentralization Briefing Notes World Bank Notes*, antara lain adalah:

1. Kerangka desentralisasi berhubungan pada marjin, keuangan lokal dan penguasa fiskal, untuk memberikan pelayanan pertanggungjawaban dan fungsi dari pemerintahan lokal.
 2. Masyarakat daerah mendapat informasi tentang biaya pelayanan dan opsi pemberian pelayanan dan sumber dananya sehingga kebijaksanaan tersebut lebih bermakna.
 3. Masyarakat membutuhkan sebuah mekanisme untuk mengekspresikan keinginannya terutama penyaluran inisiatifnya melalui para politisi.
 4. Adanya sistem yang akuntabel berdasarkan informasi yang transparan, dengan demikian masyarakat dapat memonitor *performance* pemerintah daerah.
 5. Alat dari desentralisasi seperti kerangka institusi yang legal, struktur dari pertanggungjawaban pelayanan dan sistem fiskal antara pemerintah daerah harus dirancang untuk mendukung tujuan politis.
- Selanjutnya, partisipasi dan desentralisasi mempunyai hubungan yang simbiotik. Pada satu pihak, keberhasilan desentralisasi pada keadaan tertentu membutuhkan partisipasi daerah. Di lain pihak, proses desentralisasi bisa mendorong kesempatan untuk berpartisipasi. Desentralisasi dapat diartikan sebagai suatu pendelegasian tanggung jawab atau penyerahan kekuasaan dan wewenang. Mengenai desentralisasi fiskal ada beberapa pendapat yang berbeda dalam melaksanakan fungsi, tanggung jawab dan penyediaan sumber keuangan

daerah. Pendapat pertama menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsinya tergantung pada kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan yang independen, seperti misalnya dana yang berasal dari pajak dan retribusi, karena semakin besar menggali sumber penerimaannya akan memperkecil pengawasan pusat. Pendapat kedua menyatakan bahwa hubungan ketergantungan daerah atas dana dari pusat dengan keleluasaan daerah atas pengeluaran-pengeluaran daerah adalah tidak langsung. Pemerintah daerah harus mempunyai sumber pendapatan yang elastis, tidak tergantung dari asal dana tersebut dan memiliki keleluasaan terutama dalam menggunakan dana tersebut. Adapun tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik baik yang dibiayai pemerintah pusat maupun daerah melalui PAD.

Sementara itu, perlu diwaspadai pula bahwa desentralisasi bisa gagal dalam memperhatikan pelayanan daerah dan dapat juga mengganggu stabilitas nasional. Resiko terbesar dapat terjadi ketika penerimaan didesentralisir tanpa disertai langkah-langkah yang memadai dalam menjamin stabilitas mobilisasi dana yang mencukupi dan berlanjut, dan memastikan kemampuan serta tanggung jawab daerah dalam mengelola pengeluaran. Argentina pada tahun 1980-an merupakan contoh yang sering diangkat. Pengalaman internasional dengan jelas juga memperlihatkan bahwa jika suatu negara mendesentralisasikan tanggung

jawab pengeluaran yang lebih besar dibanding dengan sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat pelayanan akan menurun atau daerah akan menekan pusat. Langkah ini biasanya berhasil untuk mendapatkan tambahan kucuran dana yang lebih besar, atau pinjaman yang lebih besar atau kedua-duanya. Salah satu contoh terjelas, dan yang paling banyak dianalisis, adalah kasus-kasus di negara-negara Federasi Rusia (Bird, 2001). Sebaliknya, jika lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran yang didesentralisasikan, mobilisasi dana daerah dapat menurun dan ketidakseimbangan makro ekonomi kembali muncul. Negara-negara seperti Argentina dan Brazil sering sekali dijadikan contoh buruk dalam hal ini. Bahkan, walaupun kedua sisi didesentralisasikan dengan pola yang seimbang, sering dikhawatirkan daerah tidak memiliki kapasitas administratif dan teknis yang cukup memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi barunya secara memuaskan. Permasalahan-permasalahan demikian mungkin perlu diperhatikan secara khusus pada negara-negara berkembang yang memerlukan investasi sosial dan infrastruktur yang penting untuk mengadakan pembangunan di pemerintahan daerah. Di samping desentralisasi, di Indonesia juga dikenal sistem penyelenggaraan negara yang lain yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

4.3.2. Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi juga berdasarkan Pasal 18 UUD 1945. Meskipun prinsip otonomi dilaksanakan, bukan berarti asas

dekonsentrasi tidak diperlukan. Untuk urusan tertentu oleh pemerintahan pusat, asas ini masih relevan. Dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara yang tingkatannya lebih besar kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan. Hal ini memiliki kelemahan, karena pejabat wilayah lokal tidak menyadari alternatif-alternatif yang mereka miliki, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa sistem ini sangat efektif dalam memberi kemudahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat lokal (daerah).

4.3.3. Tugas Pembantuan

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kadang-kadang berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya atas dasar dekonsentrasi. Hal ini mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintahan pusat di daerah, sehingga apabila dilihat dari segi daya guna dan hasil guna kurang efektif dan efisien. Lebih lanjut apabila dilihat dari sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintahan daerah yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka aturan UU memungkinkan untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan pusat di daerah dengan asas tugas pembantuan. Dalam UU No.22 Tahun 1999 pasal 1 (g), tugas pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari pusat kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta

sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Dari penjelasan di atas tampak peluang untuk digunakan asas tugas pembantuan, masih merupakan alternatif sebagaimana yang dijadikan dasar salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah di daerah yaitu: asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan.

4.4. Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan disertai dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas tersebut ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan dari pusat atau daerah tingkat atasannya kepada daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya dalam kaitannya dengan hak otonomi yang diberikan. Ada empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya system hubungan keuangan pusat dan daerah (Sidik, 2001):

1. Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional diantara berbagai tingkat pemerintahan mengenai penggalan sumber-sumber dana pemerintahan dan kewenangan penggunaannya.

2. Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
3. Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil diantara daerah-daerah, atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu.
4. Pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

4.5. Beberapa Pendekatan Hubungan Keuangan Pusat Daerah

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang bervariasi dapat ditinjau dari beberapa pendekatan yang berbeda yaitu:

a. Kapitalisasi

Pemerintah daerah diberi sejumlah modal, yang diharapkan untuk diinvestasikan, sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin dan mungkin membayar kembali modal tersebut. Modal tersebut mungkin disediakan melalui bantuan (*grant*) atau melalui penyerahan (*equity*). Sumber modal bisa berasal dari pemerintah, sumber internasional atau sektor swasta.

b. Pemberian sumber-sumber pendapatan

Pemerintah daerah diberi sumber-sumber pendapatan tertentu untuk dimanfaatkan bagi pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan ini berarti bahwa pembagian dana dari pusat kepada pemerintah daerah untuk menutup seluruh/sebagian biaya, berupa pinjaman, bantuan atau bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sistem ini bertujuan untuk membiayai tingkat pengeluaran tertentu/pembiayaan pelayanan atau program pembangunan tertentu.

d. Perpaduan menyeluruh atas pendapatan dan pengeluaran

Menurut pendekatan ini, sumber-sumber pendapatan dan tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah dengan berdasarkan kepada tingkat kemampuan dan biayanya. Bantuan pusat atau pinjaman diberikan untuk menutup perbedaan antara hasil dari pendapatan yang telah diberikan dengan kebijakan pengeluaran. Hubungan keuangan pusat dan daerah tidak hanya sekedar pembiayaan masalah dana, namun sebenarnya merupakan pencerminan dari pembagian beban antara pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah didasarkan pada faktor-faktor tertentu dan ada ketentuan yang mengatur berapa besar dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Masing-masing daerah

berhak menentukan kemajuannya sendiri, semakin maju suatu daerah maka semakin sedikit ketergantungan kepada pusat. Merancang suatu sistem hubungan fiskal antar pemerintahan bukanlah merupakan hal yang mudah. Masalahnya begitu rumit, kompleks dan saling berkaitan. Banyak faktor harus dipertimbangkan untuk merumuskan suatu sistem hubungan fiskal yang baik selain faktor obyektif, teknis, ekonomi juga faktor non ekonomi. Sasaran mendasar yang ingin dicapai dengan hubungan fiskal adalah efisiensi, pemerataan, keadilan dan yang menunjang pertumbuhan.

4.6. Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *selfsupporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana (Kaho, 1997:124). Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, menyangkut tentang kebijakan keuangan daerah :

1. Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan,
2. Sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, atau dalam bentuk subsidi dan bantuan serta pinjaman,
3. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan aparturnya.

Sebagai suatu sistem, keuangan daerah terdiri dari berbagai sub sistem antara lain organisasi, tata buku, prosedur, penganggaran, pengendalian, sarana dan prasarana. Selanjutnya mengingat keuangan daerah sebagai sub sistem maka penanganan keuangan daerah itu sendiri harus dilakukan dengan pendekatan kesisteman. Sehingga, kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah pusat dalam mengendalikan pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi sebenarnya yang ada di daerah. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni (Kaho,1997:126):

1. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat,
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut,
4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan,
5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, Pamudji (dalam Kaho,1997:125) menegaskan: “Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.

Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.” Selanjutnya, kebijakan keuangan itu sendiri pada akhirnya harus mampu menunjukkan kondisi yang sebenarnya bagi daerah dari segi kemandirian dalam keuangan. Yang pada akhirnya segala dari proses ini bermuara pada terpenuhinya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Bagaimanapun juga, berhasil tidaknya suatu kegiatan dilakukan dalam hal ini pelaksanaan desentralisasi fiskal, akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksananya atau aparatur pemerintah daerah itu sendiri.

4.7. Kebutuhan Fiskal Daerah

Struktur dan jenis belanja daerah, aktifitas yang membutuhkan sumberdaya, serta pemicu biaya (*cost driver*) perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan daerah, sebab setiap daerah membutuhkan dana untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Belanja Administrasi Umum.

Biaya untuk keperluan tersebut mencakup keseluruhan biaya yang diperlukan agar organisasi pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada publik. Komponen biaya ini terdiri dari :

- a. Belanja pegawai, yakni biaya yang dikeluarkan berupa uang tunai yang dibayarkan kepada pegawai daerah otonom. Belanja pegawai ini terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, tunjangan beras, honorarium dan vakansi, uang lembur, upah pegawai harian tetap, biaya pengobatan dan perawatan pegawai, dan belanja pegawai lain-lain.
- b. Belanja Barang/Jasa, yakni semua pengeluaran yang dilakukan untuk ongkos kantor, pembelian inventaris kantor, biaya pendidikan, biaya perpustakaan, biaya Hansip, biaya pakaian dinas, pembelian peralatan dokter, pembelian alat-alat perlengkapan laboratorium, pembelian inventaris ruangan pasien, pembelian perlengkapan dapur rumah sakit, pembelian obat-obatan, pembelian bahan laboratorium, pembelian bahan percontohan, dan lain-lain.
- c. Belanja Pemeliharaan mencakup semua pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan rumah dinas, asrama, mess, dan sebagainya, pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah (KDH), pemeliharaan kendaraan dinas Wakil Kepala Daerah, pemeliharaan kendaraan dinas lainnya, pemeliharaan inventaris kantor, dan lain-lain.
- d. Belanja Perjalanan Dinas, yakni biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan dinas pindah, biaya pemulangan pegawai yang dipensiunkan, biaya perjalanan dinas lainnya.

Besar-kecilnya biaya penyelenggaraan pemerintahan dan atau belanja administrasi umum tidak dapat dikaitkan dengan jumlah pegawai karena akan mendorong pemerintah daerah untuk berlomba mengangkat atau menambah jumlah pegawai tanpa melakukan 'analisis kebutuhan'. Agar ukuran dan aktivitas organisasi pemerintah daerah tidak membengkak serta untuk mendorong efisiensi, setiap daerah perlu didorong untuk justru 'merampingkan' organisasi sesuai dengan standar dan atau kebutuhan pelayanan pada masyarakat. Penyediaan barang dan prasarana khususnya belanja administrasi umum terkait dengan volume aktivitas berupa pemberian pelayanan, sehingga pemicu biaya ini sesungguhnya adalah volume aktivitas pelayanan. Volume aktivitas pelayanan sangat terkait dengan jumlah penduduk yang dilayani. Oleh karena itu secara umum, kebutuhan akan dana untuk belanja administrasi dan umum, dapat diproksi dengan menggunakan variabel jumlah penduduk.

2. **Biaya Pemeliharaan Fasilitas Publik.** Biaya ini mencakup keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasi untuk menjaga dan memelihara sarana dan prasarana publik yang dipunyai agar dapat beroperasi secara optimal. Unsur-unsur biaya ini meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas.

Berbeda dengan biaya sebelumnya, biaya ini tidak terkait dengan jumlah pegawai maupun ukuran organisasi. Biaya ini juga diidentifikasi tidak terkait

secara nyata dengan luas wilayah, karena belum tentu daerah yang mempunyai wilayah cukup luas juga menyediakan fasilitas yang banyak. Standar fasilitas publik umumnya memang ditentukan berdasarkan fasilitas yang banyak, tetapi secara riil standar tersebut tidak pernah dipenuhi. Belanja pemeliharaan mempunyai hubungan langsung dengan volume aktivitas pemeliharaan yang dipicu oleh volume dan jumlah aktiva atau kekayaan tetap (fasilitas publik) berwujud yang dipunyai oleh daerah, antara lain: jalan dan jembatan, saluran pematuan, saluran irigasi atau pengairan, luas lahan milik daerah (yang memerlukan pemeliharaan), jumlah dan kapasitas kesehatan, jumlah dan kapasitas pendidikan.

3. Belanja Pembangunan merupakan pengeluaran-pengeluaran yang bukan saja ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, tetapi juga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas, pengeluaran pembangunan mencakup pengeluaran-pengeluaran untuk :
 - a. Sarana dan prasarana ekonomi, seperti pengeluaran untuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, kapasitas listrik, energi dan lain-lain.
 - b. Peningkatan sumberdaya manusia: pendidikan, kesehatan dan peranan wanita.
 - c. Peningkatan kesejahteraan rakyat: pembangunan perumahan, pengembangan kehidupan beragama.
 - d. Peningkatan kapasipas pemerintah: anggaran pengembangan aparatur pemerintah.

- e. Atau secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: belanja modal aparatur dan belanja modal publik. Dalam terminologi ekonomi publik besarnya belanja pembangunan mengindikasikan besarnya investasi pemerintah.

Hal ini didukung oleh Suparmoko (2000, 44) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Pengeluaran investasi yang menambah kekuatan dan *ketahanan ekonomi* di masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran yang langsung memberikan *kesejahteraan dan kegembiraan* bagi masyarakat seperti untuk bidang rekreasi.
- c. Pengeluaran yang merupakan *penghematan* untuk masa yang akan datang, misalnya: pengeluaran untuk anak yatim piatu.
- d. Pengeluaran untuk menyediakan *kesempatan kerja* yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Atas dasar penilaian tersebut, pengeluaran pemerintah dibedakan antara lain:

- Pengeluaran yang bersifat *self liquidating* baik sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah yang mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang-barang yang bersangkutan.
- Pengeluaran yang *reproduktif*, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah.

Dua pendekatan yang secara umum dapat digunakan untuk menentukan besarnya pengeluaran pemerintah dalam bentuk dana pembangunan daerah adalah :

- a. ***Pendekatan Incrementalism***, yang didasarkan pada perubahan satu unit atau lebih variabel yang bersifat umum seperti jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat, maka besarnya alokasi dana untuk tiap kegiatan yang sudah tertentu akan meningkat dari besar alokasi semula.
- b. ***Pendekatan line-item budget***, yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang telah ada, meskipun keberadaan pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002 : 168),

Dipandang sebagai investasi, pengeluaran pembangunan sangat diperlukan guna menjaga dan memelihara momentum pembangunan secara berkelanjutan. Bersama-sama dengan investasi swasta domestik, pengeluaran ini tidak hanya berpengaruh pada sisi permintaan, tetapi juga berpengaruh pada sisi penawaran agregat, sebagaimana dikemukakan dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar (ML. Jhingan, 1988: 281). Sejalan dengan perkembangan ekonomi suatu daerah, kebutuhan akan pengeluaran pembangunan akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rostow dan Musgrave dalam Sutrisno (1984 : 364) menyatakan bahwa pada tahap awal dari perkembangan ekonomi, persentase

investasi pemerintah dari total investasi adalah besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana jalan, irigasi, jembatan, tenaga listrik, jaringan komunikasi. Oleh karena itu adalah wajar jika dikatakan pengeluaran pemerintah akan makin meningkat dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, dimana dalam istilah Adolf Wagner dikenal dengan "*Gesets der Wachsenden Ausdehnung den Staatstätigkeiten*" atau hukum semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan negara.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk pembangunan, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

4.8. Teori Makro Mengenai Pengeluaran Pemerintah

4.8.1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.

Model ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang mengembangkan teori pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pengembangan ekonomi. Pada tahap awal dari perkembangan pemerintah ekonomi prosentase investasi pemerintah dari total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pada tahap menengah perkembangan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.

Peranan pemerintah dalam pembangunan pada tahap menengah tetap besar, oleh karena itu banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan karena perkembangan ekonomi. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin erat. Musgrave berpendapat bahwa dalam proses perkembangan, investasi swasta dalam prosentase investasi pemerintah dalam prosentase terhadap GNP semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa perkembangan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial.

4.8.2. Hukum Wagner.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP yang juga didasarkan pengamatan di negara – negara Eropa, USA, dan Jepang pada abad ke 19. Hukum Wagner berisi bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pembelian barang – barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (

Organic Theory Of State) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Hukum Wagner diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{Pk PP1}{PPk1} < \frac{Pk PF 2}{PPk2} < \dots < \frac{Pk PPn}{PPkn}$$

Keterangan :

PkPP = Pengeluaran pemerintah per kapita

PPk = Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,3.....n = Jangka waktu (tahun)

4.8.3. Teori Peacock dan Wisemen

Teori Peacock dan Wisemen didasarkan pada suatu analisis bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran dan sebaliknya, masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Teori ini merupakan dasar teori pungutan suara. Peacock dan Wisemen mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat menahan besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dalam teorinya Teori Peacock dan wisemen mengatakan “Perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tariff pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatkan GNP

menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar". Teori mikro mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor - faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan dilaksanakan tersebut selanjutnya akan memberikan perantara akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- $U_i = f(G, X)$
- G = Vektor dari barang publik
- X = Vektor dari barang swasta
- I = Individu ; $I = 1, \dots, m$.
- U = Fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang – barang publik dan barang – barang swasta. Akan tetapi permintaan efektif akan barang – barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran. Kita anggap bahwa seorang individu (i) membutuhkan barang publik (k) sebagai G_{ik} .

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik
2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses faktor produksi.
3. perubahan – perubahan kualitas barang
4. Perubahan – perubahan harga

Pengeluaran pemerintah daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Semakin meningkatnya peranan pemerintah daerah dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah daerah dalam proporsinya terhadap pendapatan daerah. Pengeluaran daerah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah daerah. Semakin besar dan banyak kegiatan daerah semakin besar pula pengeluaran daerah yang bersangkutan. Pengeluaran daerah dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang akan dijelaskan disini hanya pengeluaran pembangunan karena sesuai judul skripsi yang dibuat.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang, program pembangunan dilaksanakan secara bertahap melalui rangkaian repelita. Untuk itu setiap anggaran pembangunan yang tercermin dalam APBD senantiasa disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi dan dialokasikan pada berbagai bidang dengan prioritas yang direncanakan repelita. Pada tahun – tahun anggaran 1983/1984 sampai dengan tahun anggaran 1986/1987 untuk Kabupaten Bantul ini realisasi

pengeluaran pembangunan dialokasikan untuk belanja perbaikan terhadap bangunan jalan, jembatan, irigasi, proyek, belanja modal untuk membeli perlengkapan kendaraan mesin dan pemberian subsidi.

Untuk tahun – tahun selanjutnya pengeluaran pembangunan telah dialokasikan pada pengeluaran pembangunan pada bidang ekonomi, bidang sosial, bidang umum dan sebagainya. Pengeluaran pembangunan senantiasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar prinsip anggaran berimbang dan dapat dipertahankan.

4.9. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul?
2. Diduga Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul?
3. Diduga PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul?
4. Diduga Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul?
5. Diduga Otonomi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul?

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Metode Penelitian

5.1.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu pengeluaran pembangunan dan empat variabel bebas yaitu redistribusi daerah, laba BUMD, PDRB, dan Inflasi. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta.

5.1.2. Definisi Variabel

a. Pengeluaran Pembangunan.

Pembangunan merupakan pengeluaran-pengeluaran yang bukan saja ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, tetapi juga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas, pengeluaran pembangunan mencakup pengeluaran-pengeluaran untuk :

1. Sarana dan prasarana ekonomi, seperti pengeluaran untuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, kapasitas listrik, energi dan lain-lain.
2. Peningkatan sumberdaya manusia: pendidikan, kesehatan dan peranan wanita.
3. Peningkatan kesejahteraan rakyat: pembangunan perumahan, pengembangan kehidupan beragama.

4. Peningkatan kapasitas pemerintah: anggaran pengembangan aparatur pemerintah.

5. Atau secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: belanja modal aparatur dan belanja modal publik. Dalam terminologi ekonomi publik besarnya belanja pembangunan mengindikasikan besarnya investasi pemerintah.

b. Restribusi Daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pada prinsipnya pungutan yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya. (M. Suparmoko, 2002).

c. Laba BUMD

Badan Usaha Milik Daerah merupakan aset yang dimiliki oleh daerah dan dikelola oleh daerah guna memperoleh laba yang nantinya akan dimasukkan kedalam pendapatan daerah. BUMD yang dimiliki oleh daerah misalnya bank Pasar dan Perusahaan Air Minum.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi makro yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian suatu wilayah. Dengan mengamati angka-angka Produk Domestik Regional (PDRB) akan dapat diketahui besarnya peranan dari masing-masing sektor perekonomian yang nantinya dapat di ketahui apakah suatu wilayah itu pertanian, industri, jasa dan sebagainya.

Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor usaha yang melakukan usaha suatu daerah (regional) tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi.

e. Inflasi

Kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum dalam suatu perekonomian, dalam kurun waktu tertentu.

5.2. Metode Analisis Data

5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil

Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS (*ordinary least square*), dengan fungsi Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Bantul= f (Restribusi Daerah, Laba BUMD, PDRB, Inflasi dan Otonomi Daerah), maka persamaan regresi liniernya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Dm + e$$

Keterangan:

Y = Pengeluaran Pembangunan (Juta Rp)

X₁ = Restribusi Daerah (Juta Rp)

X₂ = Laba BUMD (Juta Rp)

X₃ = PDRB (Juta Rp)

X₄ = Inflasi (%)

D_m = Dummy variabel untuk melihat pengaruh adanya otonomi daerah terhadap Pengeluaran Pembangunan

β₀ = Konstanta regresi

β₁, β₂, β₃, β₄ = Koefisien regresi

e = Kesalahan pengganggu

5.2.2. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini menggunakan uji *Mackinnon, White and Davidson* (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan digunakan berbentuk linier atau log linier.

Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

- Linear → $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 D_m + e$

- Log Linier → $\ln Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 \ln X_3 + \alpha_4 \ln X_4 + \alpha_5 D_m$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa

H₀ : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dan selanjutnya dinamai F_1 .
2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F_2 .
3. Dapatkan nilai $Z_1 = \ln F_1 - F_2$ dan $Z_2 = \text{antilog } F_2 - F_1$
4. Estimasi persamaan berikut ini :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 D_m$$

Jika Z_1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nol dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nol dan model yang tepat digunakan adalah model linier.

5. Estimasi persamaan berikut :

$$\ln Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 \ln X_3 + \alpha_4 \ln X_4 + \alpha_5 D_m$$

Jika Z_2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis, hipotesis alternative dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier. (Agus Widarjono ; 2005)

5.2.3. Uji Statistik

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian : (Gujarati ; 1999)

a. Uji t Statistik

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis yang digunakan :

a. Jika Hipotesis positif

$H_0 : \beta_i \leq 0 \rightarrow$ Tidak ada pengaruh antara variabel independent dengan dependen

$H_a : \beta_i > 0 \rightarrow$ Ada pengaruh antara variabel independent dengan dependen

b. Jika Hipotesis negative

$H_0 : \beta_i \geq 0 \rightarrow$ Tidak ada pengaruh antara variabel independent dengan dependen

$H_a : \beta_i < 0 \rightarrow$ Ada pengaruh antara variabel independent dengan dependen

2. Pengujian satu sisi

Jika $T_{table} \geq t_{hitung}$, H_0 diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $T_{table} < t_{hitung}$, H_0 ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F statistik

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara sebagai berikut :

$H_0 : \beta_i = 0$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel independen.

$H_a : \beta_i \neq 0$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Hasil pengujian adalah :

H_0 diterima (tidak signifikan) jika $F_{hitung} < F_{tabel} (df = n - k)$

H_0 ditolak (signifikan) jika $F_{hitung} > F_{tabel} (df = n - k)$

Dimana :

K : Jumlah variabel

N : Jumlah pengamatan

c. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R^2 semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R^2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

5.2.4. Pengujian asumsi klasik

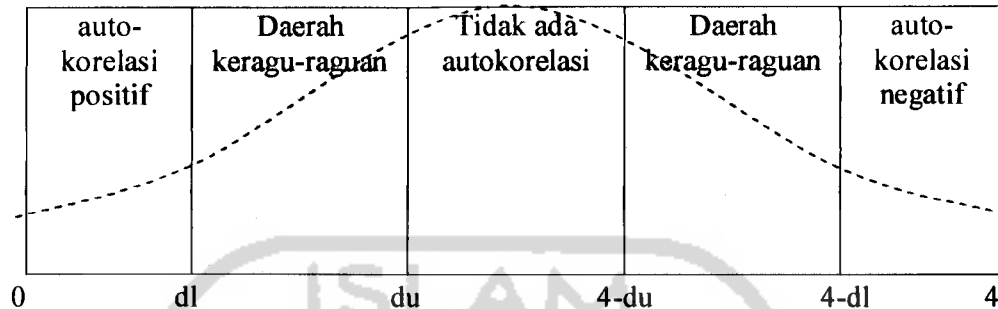
Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan:

a. Autokorelasi

Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan, pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson (DW)*, yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistik (d) dengan d_L dan d_U , jika DW statistik berada diantara d_U dan $4 - d_U$ maka tidak ada autokorelasi.

Gambar 5.1 Statistik Durbin-Watson d

Kriteria Pengambilan Keputusan :



Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan jelas dalam gambar 1.1. Atau dengan cara lain mendeteksi adanya autokorelasi dalam model bias dilakukan menggunakan uji LM atau *Lagrange Multiplier*. Salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan *lag* variabel dependen kedalam model regresi. Misalnya pada model regresi :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 D_m + e$$

Yang diyakini terdapat autokorelasi, untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi dalam model regresi tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan *lag* variabel dependen (Y) kedalam model sehingga model regresi tersebut menjadi :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 D_m + \beta_6 Y_{(t-1)}$$

(Gujarati ; 1999)

Penentuan ada tidaknya heterokedastisitas dilihat dari:

Perbandingan antara (Obs*R square) χ^2 -hitung dengan χ^2 -tabel,

jika χ^2 -hitung < χ^2 -tabel, berarti H_0 terima. Sehingga

disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas. jika χ^2 -hitung

> χ^2 -tabel, berarti H_0 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa

ada heterokedastisitas

(Gujarati ; 1999)



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder deret waktu (*time series*) yang berbentuk data kuartalan, di mana mengambil periode waktu antara 1988 sampai 2002. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa pengaruh redistribusi daerah, laba BUMD, PDRB dan inflasi serta adanya otonomi daerah terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul.

6.1. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

6.1.1. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini menggunakan uji Mackinnon, white and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan di gunakan berbentuk linier atau log linier.

Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

- Linier $\rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Dm + e$
- Log Linier $\rightarrow \ln Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 \ln X_3 + \alpha_4 \ln X_4 + \alpha_5 Dm + e$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa

Ho : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dan selanjutnya dinamai F_1 .

2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F_2 .
3. Dapatkan nilai $Z_1 = \ln F_1 - F_2$ dan $Z_2 = \text{antilog } F_2 - F_1$
4. Estimasi persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 Dm + \alpha_5 z_1 + e$$

Jika Z_1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nol dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nol dan model yang tepat digunakan adalah model linier

5. Estimasi persamaan berikut :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln x_1 + \alpha_2 \ln x_2 + \alpha_3 \ln x_3 + \alpha_4 \ln x_4 + \alpha_5 Dm + \alpha_6 z_2 + e$$

Jika Z_2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier.

Adapun aplikasi metode MWD dalam kasus regresi Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Bantul pada periode 1988 sampai dengan 2002. Dimana Restribusi Daerah, Laba BUMD, PDRB dan Inflasi merupakan variabel independen, serta kebijakan Otonomi Daerah sebagai variabel dummy sehingga kita mempunyai persamaan sebagai berikut :

- Linier $\rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Dm + e$
- Log Linier $\rightarrow \ln Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 \ln X_3 + \alpha_4 \ln X_4 + \alpha_5 Dm + e$

Y = Pengeluaran Pembangunan ; X_1 = Restribusi Daerah ; X_2 = Laba BUMD ; X_3 = PDRB ; X_4 = Inflasi ; D_m = Otonomi Daerah dan e adalah residual masing-masing model regresi.

Hasil estimasi masing-masing model adalah sebagai berikut:

o *Hasil regresi linier*

$$Y = 11.9253 + 0,00326X_1 + 1,10941X_2 + 0,31069X_3 + 1.86E-07X_4 + 7,44939D_m$$

$$t\text{-hitung} = (3,518147) \quad (1,10049) \quad (3,40841) \quad (1.79777) \quad (3.03071) \quad (4,43817)$$

$$R^2 = 0,764188$$

o *Hasil regresi log-linier*

$$Y = 12.7315 + 0,44498\ln X_1 + 0,95918\ln X_2 + 1,36890\ln X_3 + 0,39677\ln X_4 + 1,72321D_m$$

$$t\text{-hitung} = (3,64494) \quad (2,00169) \quad (3,67559) \quad (1.84396) \quad (3.53524) \quad (5.14602)$$

$$R^2 = 0,837342$$

Untuk memutuskan bentuk model dengan metode MWD kita harus menjalankan langkah nomor 1 sampai 3. Adapun langkah ke 4 metode MWD yakni melakukan regresi sebagaimana persamaan yang terdapat pada prosedur di atas yang menghasilkan informasi persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 12,89427 + 0,00404X_1 + 0,98809X_2 + 0,339211X_3 - 1,79E-07X_4 - 6.94578D_m - 1,33069Z_1$$

$$t\text{-hitung} = (2,19921)(0.82672)(1.46339)(1,48661) \quad (-2,49370) \quad (-2.31961) \quad (0,20886)$$

$$\text{Prob} = (0,0591) \quad (0,4324) \quad (0,1815) \quad (0,1754) \quad (0,0373) \quad (0,0489) \quad (0,8398)$$

$$R^2 = 0,765467$$

Nilai Probabilitas koefisien Z_1 pada persamaan diatas adalah 0,8398. Dengan demikian variabel Z_1 tidak signifikan secara statistik. Sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa model fungsi regresi yang benar adalah bentuk linear diterima. Sedangkan hasil regresi pada langkah 5 mempunyai persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y = 15,5876 - 0,68371 \ln X_1 + 0,46187 \ln X_2 + 1,97017 \ln X_3 + 0,35484 \ln X_4 - 1,32675 Dm + 1,56567 Z_2$$

$$t\text{-hitung} = (4,15505) \quad (-2,63775) \quad (1,13938) \quad (2,47675) \quad (3,28075) \quad (-3,27330) \quad (1,53384)$$

$$\text{Prob} = (0,0032) \quad (0,0298) \quad (0,2875) \quad (0,0383) \quad (0,0112) \quad (0,0113) \quad (0,1636)$$

$$R^2 = 0,874306$$

Nilai Probabilitas koefisien Z_2 pada persamaan diatas adalah 0,1636. Dengan demikian variabel Z_2 tidak signifikan secara statistik. Sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa model fungsi regresi yang benar adalah bentuk log linear diterima. Hasil kedua regresi menunjukkan bahwa hanya model fungsi linier maupun log linear bisa digunakan untuk menjelaskan tentang pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul.

6.1.2. Hasil Regresi

Analisis hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu program komputer Eviews. Hasil regresi log linier berganda yang di dapat adalah sebagai berikut :

$$Y = 12,7315 + 0,44498 \ln X_1 + 0,95918 \ln X_2 + 1,36890 \ln X_3 + 0,39677 \ln X_4 + 1,72321 Dm$$

$$t\text{-hitung} = (3,64494) \quad (2,00169) \quad (3,67559) \quad (1,84396) \quad (3,53524) \quad (5,14602)$$

R^2	= 0,837342
Adjusted R2	= 0,746976
DW Statistik	= 1,98
F-Statistik	= 9,266146

6.1.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. R^2 dalam regresi sebesar 0,8373. Ini berarti variabel pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul dapat dijelaskan oleh Restribusi Daerah, Laba BUMD, PDRB dan Inflasi serta variabel dummy Otonomi daerah sebesar 83,73 persen, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

6.1.4. Pengujian t-Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. (Damodar Gujarati, 1995, 74)

$$t\text{-tabel} = \{ \alpha ; df (n-k) \}$$

$$t\text{-hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)} =$$

Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima, berarti variabel independent secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak, berarti variabel independent secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

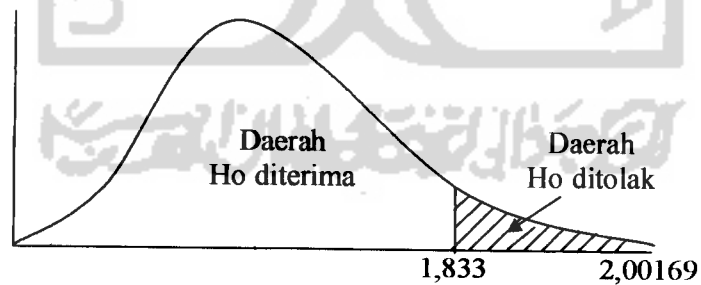
* Derajat kebebasan $\alpha = 0,05$ dan $df = 9$

Nilai $t_{\text{tabel}} = 1,833$; $t_{\text{hitung}} = 2,001691$

Karena nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $2,001691 > 1,833$ maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel redistribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan.

Gambar 6.1

Kurva Uji t variabel Redistribusi daerah



B. Uji T terhadap parameter X_2 , Hipotesanya

Bila $H_0 : b_i \leq 0 \rightarrow$ Variabel Independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Bila $H_0 : b_i > 0 \rightarrow$ Variabel Independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima, berarti variabel independent secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak, berarti variabel independent secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

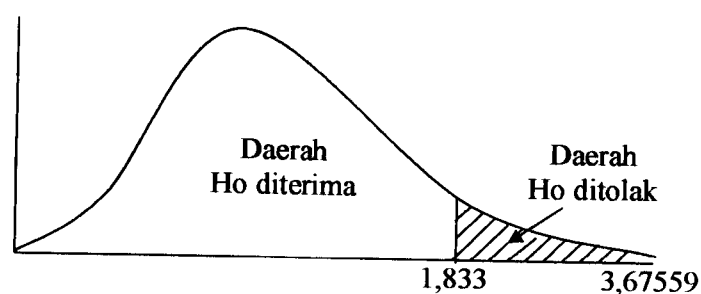
* Derajat kebebasan $\alpha = 0,05$ dan $df = 9$

Nilai t tabel = 1,833 ; t hitung = 3,675593

Karena nilai t hitung $> t$ tabel atau $3,675593 > 1,833$ maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel laba BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan.

Gambar 6.2

Kurva Uji t variabel Laba BUMD



C. Uji T terhadap parameter X3, Hipotesanya

Bila $H_0 : b_i \leq 0 \rightarrow$ Variabel Independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Bila $H_0 : b_i > 0 \rightarrow$ Variabel Independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima, berarti variabel independent secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak, berarti variabel independent secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

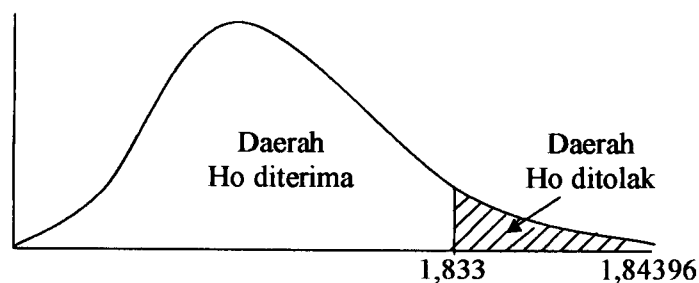
* Derajat kebebasan $\alpha = 0,05$ dan $df = 9$

Nilai $t \text{ tabel} = 1,833$; $t \text{ hitung} = 1,843967$ maka H_0 ditolak

Karena nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $1,843967 > 1,833$ maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan.

Gambar 6.3

Kurva Uji t variabel PDRB



D. Uji T terhadap parameter X4, Hipotesanya

Bila $H_0 : b_i \leq 0 \rightarrow$ Variabel Independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Bila $H_0 : b_i > 0 \rightarrow$ Variabel Independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima, berarti variabel independent secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak, berarti variabel independent secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

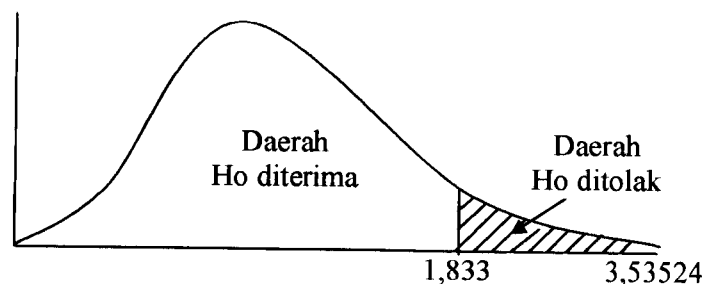
* Derajat kebebasan $\alpha = 0,05$ dan $df = 9$

Nilai $t \text{ tabel} = 1,833$; $t \text{ hitung} = 3,535246$ maka H_0 ditolak

Karena nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $3,535246 > 1,833$ maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan.

Gambar 6.4

Kurva Uji t variabel Inflasi



- $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel independen.
- $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah F-hitung = 9,266146 sedangkan F-tabel = 3,48 ($\alpha = 0,05 ; 3,48$), sehingga F-hitung > F-tabel ($9,266146 > 3,48$).

Perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel yang menunjukkan bahwa F-hitung > F-tabel, menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa variabel Restribusi Daerah (X_1), Laba BUMD (X_2), PDRB (X_3), dan Inflasi (X_4) serta otonomi daerah (D_m) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan.

6.2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu pengujian multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

6.2.1. Multikolinieritas.

Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel independen yang lain.

Pengujian terhadap gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi parsial (r^2) dengan koefisien

determinasi majemuk (R^2), jika r^2 lebih kecil dari R^2 maka tidak ada multikolinieritas.

TABEL 6.2
HASIL PENGUJIAN MULTIKOLINIERITAS

Variabel	r^2	R^2	Keterangan
X ₁ dengan X ₂	0,086611	0,837342	Tidak ada multikolinieritas
X ₁ dengan X ₃	0,176950	0,837342	Tidak ada multikolinieritas
X ₁ dengan X ₄	0,012299	0,837342	Tidak ada multikolinieritas
X ₁ dengan Dm	0,154736	0,837342	Tidak ada multikolinieritas
X ₂ dengan X ₃	0,116933	0,837342	Tidak ada multikolinieritas
X ₂ dengan X ₄	0,242272	0,837342	Tidak ada multikolinieritas
X ₂ dengan Dm	0,478547	0,837342	Tidak ada multikolinieritas
X ₃ dengan X ₄	0,013814	0,837342	Tidak ada multikolinieritas
X ₃ dengan Dm	0,362582	0,837342	Tidak ada multikolinieritas
X ₄ dengan Dm	0,038069	0,837342	Tidak ada multikolinieritas

Hasil diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolenieritas dimana seluruh nilai r^2 lebih kecil dibandingkan nilai R^2 .

6.2.2. Autokorelasi.

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain.

Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau dengan uji LM Test yang dikembangkan oleh Bruesch-godfrey, dimana uji LM Test bisa dikatakan sebagai uji autokorelasi yang paling akurat (Kuncoro, 2001, 107), apalagi jika sampel yang digunakan dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 100). Uji ini dilakukan dengan memasukkan lognya, dari hasil uji autokorelasi *Serial Correlation LM Test Lag*.

Uji Lagrange Multiplier (LM Test).

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi.

- Ho : $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada autokorelasi
- Ha : $\rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_q \neq 0$, Ada autokorelasi

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square (χ^2 -hitung) = 0,993440 sedangkan χ^2 -tabel = 5,99146 (df=2 , $\alpha = 0,05$), sehingga χ^2 -hitung < χ^2 -tabel (0,993440 < 5,99146). Perbandingan antara χ^2 -hitung dengan χ^2 -tabel, yang menunjukkan bahwa χ^2 -hitung < χ^2 -tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak. Dari hasil uji LM tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

6.2.3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan White Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat (U_i^2) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan

perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung χ^2 , di mana $\chi^2 = \text{Obs} * R \text{ square}$ (Gujarati, 1995, hal.379).

Uji White Test

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas.

- $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada heterokedastisitas
- $H_a : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_q \neq 0$, Ada heterokedastisitas

Hasil perhitungan yang didapat adalah $\text{Obs} * R \text{ square}$ ($\chi^2 \text{-hitung}$) = 8,737488 sedangkan $\chi^2 \text{-tabel} = 16,9190$ ($df = 9, \alpha = 0,05$), sehingga $\chi^2 \text{-hitung} < \chi^2 \text{-tabel}$ ($8,737488 < 16,9190$). Perbandingan antara $\chi^2 \text{-hitung}$ dengan $\chi^2 \text{-tabel}$, yang menunjukkan bahwa $\chi^2 \text{-hitung} < \chi^2 \text{-tabel}$, berarti H_0 tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White Test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas

TABEL 6.3
HASIL UJI WHITE TEST

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0,775114	Probability	0,652139
Obs*R-squared	8,737488	Probability	0,461851

6.3. Pembahasan Hasil Analisis

Hasil analisis dari persamaan regresi :

$$Y = 12,7315 + 0,44498\ln X_1 + 0,95918\ln X_2 + 1,36890\ln X_3 + 0,39677\ln X_4 + 1,72321D_m$$

Hasil estimasi dan pengujian satu pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan ternyata hasil estimasi Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Bantul tidak terdapat Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi sehingga hasil dari pengujian tersebut dapat diaplikasikan lebih lanjut.

1. Variabel pertama menyatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel Restribusi Daerah, Laba BUMD, PDRB dan Inflasi serta Otonomi Daerah, hal ini dapat dilihat dari pengujian secara serempak yang telah dilakukan yaitu ternyata $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ini berarti secara bersama-sama variabel Restribusi Daerah, Laba BUMD, PDRB dan Inflasi serta Otonomi Daerah secara statistik signifikan terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul, selain itu dengan melihat besarnya angka determinasi (R^2) = 0,837342 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 83,73 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.
2. Koefisien restribusi daerah sebesar 0,44498 ini berarti setiap kenaikan restribusi daerah sebesar 1 persen akan menyebabkan pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul akan naik sebesar 0,44498 persen.

Variabel retribusi daerah (X_1) secara statistik positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul, ini berarti sesuai dengan hipotesis awal. Jadi adanya kenaikan retribusi daerah akan mengakibatkan adanya kenaikan pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Efektifitas penggunaan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah khususnya untuk pengeluaran pembangunan sangat diperlukan sekali. Ini lebih disebabkan karena, betapapun besarnya pendapatan yang diterima dari retribusi daerah tersebut apabila penggunaannya tidak efisien tidak akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

3. Koefisien Laba BUMD sebesar 0,95918 ini berarti setiap kenaikan Laba BUMD sebesar 1 persen akan menyebabkan pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul akan naik sebesar 0,95918 persen. Variabel laba BUMD (X_2) secara statistik positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul, ini berarti sesuai dengan hipotesis awal. Jadi adanya laba BUMD akan mengakibatkan adanya kenaikan pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul. Agar BUMD yang ada mampu memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap PAD

Kabupaten Bantul maka perlu adanya pengoptimalan kinerja dari BUMD serta pengelolaan dan manajemen yang baik terhadap BUMD tersebut. Sehingga nantinya bisa memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi adanya laba BUMD yang besar tanpa adanya efektifitas dari penggunaan laba BUMD tersebut, akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu adanya efektifitas pengeluaran APBD khususnya pengeluaran pembangunan sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Koefisien PDRB sebesar 1,36890 ini berarti setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen akan menyebabkan pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul akan naik sebesar 1,368901 persen. Variabel PDRB (X_3) secara statistik positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul, ini berarti sesuai dengan hipotesis awal. Jadi adanya kenaikan PDRB akan mengakibatkan adanya kenaikan pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul. PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam suatu perekonomian. PDRB umumnya dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PDRB, diartikan sebagai semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tetapi adanya PDRB yang besar tanpa adanya efektifitas dari penggunaan PDRB untuk pembiayaan pembangunan, akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan tumbuh sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu perlu adanya efektifitas pengeluaran APBD

khususnya pengeluaran pembangunan sehingga nantinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Koefisien Inflasi sebesar 0,39677 ini berarti setiap kenaikan Inflasi sebesar 1 persen akan menyebabkan pengeluaran pembangunan di kabupaten bantul akan naik sebesar 0,396771 persen. Variabel inflasi (X_4) secara statistik positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul, ini berarti sesuai dengan hipotesis awal. Jadi adanya kenaikan Inflasi akan mengakibatkan adanya kenaikan pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul. Adanya inflasi menyebabkan terjadinya kenaikan harga-harga secara umum. Dengan adanya kenaikan harga-harga tersebut, beban biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran pembangunan oleh pemerintah daerah akan semakin meningkat pula. Oleh karena itu, inflasi harus ditekan secara seminimal mungkin. Sehingga beban biaya akibat adanya inflasi yang dikeluarkan untuk pengeluaran pembangunan tersebut bisa ditekan sekecil mungkin.
6. Kebijakan otonomi daerah (Dm) secara statistik positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul. Ini berarti sesuai dengan hipotesis awal. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah tersebut akan mengakibatkan adanya kenaikan pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana Otonomi Daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali lima bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter, Fiskal. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut kemandirinya dan diharapkan dengan segala potensi yang ada bisa mengembangkan daerahnya sehingga nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum diyakini bahwa adanya otonom daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, selain usaha-usaha peningkatan PAD maka hal yang perlu dilakukan adalah pemerintah kabupaten Bantul adalah peningkatan

efektifitas pengeluaran APBD khususnya pengeluaran pembangunan selain itu juga mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam pengambilan keputusan terutama dalam memenuhi tuntutan pelayanan publik, dalam artian harus benar-benar mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diterima



BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul yang parameternya menggunakan metode OLS telah mengungkapkan pengaruh dari redistribusi daerah, laba BUMD, PDRB dan Inflasi serta adanya pelaksanaan otonomi daerah terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul, maka dibuat kesimpulan sebagai berikut :

- Redistribusi daerah, laba BUMD, PDRB dan Inflasi serta adanya pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan mempengaruhi pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul, hal ini terlihat dari pengujian serentak yang telah dilakukan yaitu nilai f statistik $>$ f tabel.
- Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel redistribusi daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul dan sesuai dengan hipotesa.
- Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel Laba BUMD berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul.

- Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa variabel PDRB signifikan dan positif terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul dan sesuai dengan hipotesa.
- Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa variabel Inflasi signifikan dan positif terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul dan sesuai dengan hipotesa.
- Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa variabel dummy Otonomi Daerah signifikan dan positif terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten Bantul dan sesuai dengan hipotesa.

7.2 IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, implikasi kebijaksanaan berkaitan dengan hasil penelitian adalah :

1. Sebaiknya dalam penetapan tarif retribusi harus memperhatikan hal-hal berikut: 1). Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 2). Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 3). Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.
2. Langkah - langkah peningkatan kinerja BUMD memerlukan terobosan besar dalam manajemen pengelolaan BUMD tersebut. Dalam rangka itu

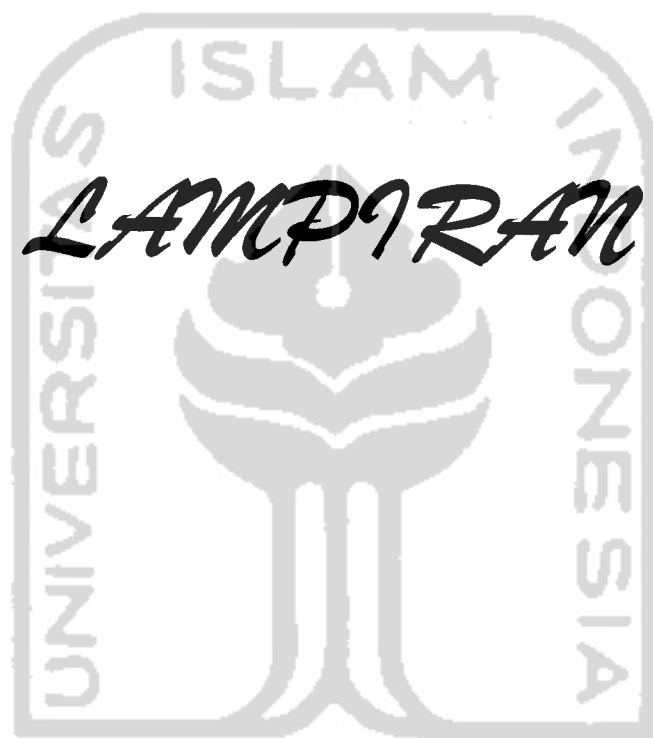
peraturan - peraturan daerah yang ada harus memberikan lingkungan (*environment*) yang kondusif dan positif. Agar dalam pengelolaan kedepan berjalan secara professional, selain itu tentunya dengan tetap menerapkan konsep *good corporate governance*.

3. Peningkatan PDRB dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang ada, yang nantinya bisa meningkatkan kegiatan perekonomian.
4. Diharapkan agar pemerintah dapat menekan laju Inflasi pada tingkat yang wajar sehingga perekonomian bisa tumbuh sesuai dengan baik, sehingga nantinya bisa tercipta kesejahteraan masyarakat.
5. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan pemerintah mampu berperan aktif dalam peningkatan perekonomian serta peningkatan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pemenuhan kebutuhan pokok dan pengembangan produksi pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin (1992), *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Bahrul, Elmi (2002), *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Basri, Faisal (1997), *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad 21*, Erlangga, Jakarta.
- Bird, Richard, 2001: *Intergovernmental Transfer in Developing And Transition Countries*. <http://www.yahoo.com>
- BPS, (1988-2002). "*Bantul Dalam Angka: Realisasi Anggaran Pendapatan Balanja Daerah kab Bantul*". Badan Pusat Statistik, Yogyakarta.
- BPS, (1988-2002). "*Yogyakarta Dalam Angka: Realisasi Anggaran Pendapatan Balanja Daerah Yogyakarta*". Badan Pusat Statistik, Yogyakarta.
- Dick, H., (1993). "*The Economic Role of Surabaya*". In H.,J.J. Fox, & J. Mackie. <http://www.yahoo.com>
- Gujarati, Damodar (2000), *Econometric*, Erlangga, Jakarta.
- Hakim, Abdul (2002), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Pertama, Ekonosia, Yogyakarta
- Halim, A. and Abdullah, S., (2004). "*Local Original Revenue (PAD) as A Source of Development Financing*". Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Association) ke 6 di Jogjakarta
- Halim, Abdul., (2001). "*Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*", UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
- Ismail, M., (2002). "*Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*", FE Unibraw, Malang
- Jhingan, M.L. (1990), "*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*" Rajawali Pers, Jakarta.
- Kaho, Joseph Rewu, (1997), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta.

- Kuncoro, M., (2004). *"Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang"*, Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad (1997), *Ekonomi Pembangunan : Teori, masalah, dan kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mahfud, Sidik. 2001, *Desentralisasi Fiskal*, makalah seminar nasional FE UNAIR, Surabaya.
- Mangkoesoebroto, G. (1999), *Ekonomi Publik*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory (1999), *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta.
- Michael.P. Todaro (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Musgrave, R. A. and Musgrave, P. B., (1991). *"Keuangan Negara dalam Teori danPraktek"*. Erlangga, Jakarta.
- Saad, Ilyas., (2003). *"Implementasi Otonomi Daerah sudah mengarah pada Distorsi dan High Cost Economy"*. Smeru Working Paper. <http://www.yahoo.com>
- Sidik, M., (2001), *"Studi Empiris Desentralisasi Fiskal, Prinsip pelaksanaan di Berbagai Negara Serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D (personil, peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi) Sebagai konsekuensi Kebijakan Pemerintah"*. Makalah disampaikan dalam Sidang Pleno X Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Batam. www.yahoo.com
- Suparmoko, (2000), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Tampubolon Et al, (2002). *"Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Potensi Peningkatan PAD di Kabupaten Tapanuli Utara"* SAID Working Paper. <http://www.yahoo.com>



LAMPIRAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lampiran I. Data Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, Distribusi Daerah, Laba BUMD dan Inflasi serta Variabel Dummy Otonomi Daerah. (periode 1988-2002)

Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	Dm
1988	2227.572	483.328	22.408	1074.685	4.43	0
1989	3489.947	797.042	25.487	1113.132	5.21	0
1990	5004.315	938.681	38.190	1225.455	10.73	0
1991	7429.563	1321.140	55.667	1340.707	8.38	0
1992	9135.571	1732.390	85.098	1408.499	4.78	0
1993	10439.523	1835.429	108.046	701.668	10.01	0
1994	11982.398	2041.369	107.612	757.530	8.55	0
1995	12609.695	2300.998	213.351	812.337	9.64	0
1996	13124.975	2753.616	351.079	866.488	3.05	0
1997	16914.324	3424.408	423.124	892.459	12.72	0
1998	17363.486	3505.459	398.182	809.011	77.46	0
1999	20487.735	4910.778	584.786	819.324	2.51	0
2000	25014.636	4755.672	644.093	845.718	7.32	0
2001	31372.852	8467.348	974.168	871.970	12.56	1
2002	53714.783	12219.621	3075.864	903.932	12.01	1

Keterangan :

Y = Pengeluaran Pembangunan (Juta Rp)

X1 = Restribusi daerah (Juta Rp)

X2 = Laba BUMD (Juta Rp)

X3 = PDRB (Juta Rp)

X4 = Inflasi (%)

Dm = Otonomi Daerah

Lampiran IV. Hasil uji MWD dengan model linier

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 07/16/06 Time: 01:23
Sample: 1988 2002
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.004048	0.004896	0.826720	0.4324
X2	0.988096	0.675210	1.463391	0.1815
X3	0.339211	0.228177	1.486614	0.1754
X4	-1.79E-07	7.20E-08	-2.493702	0.0373
DM	-6.945787	2.994377	-2.319610	0.0489
Z1	1.330694	6.371175	0.208862	0.8398
C	12.89427	5.863137	2.199211	0.0591
R-squared	0.765467	Mean dependent var	6.135733	
Adjusted R-squared	0.589568	S.D. dependent var	3.376158	
S.E. of regression	2.162935	Akaike info criterion	4.685534	
Sum squared resid	37.42630	Schwarz criterion	5.015957	
Log likelihood	-28.14150	F-statistic	4.351731	
Durbin-Watson stat	1.941850	Prob(F-statistic)	0.030018	

Lampiran V. Hasil uji MWD dengan model log linier

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 07/16/06 Time: 01:25
Sample: 1988 2002
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	-0.683719	0.259205	-2.637754	0.0298
LOG(X2)	0.461874	0.405371	1.139386	0.2875
LOG(X3)	1.970172	0.795466	2.476750	0.0383
LOG(X4)	0.354840	0.108158	3.280755	0.0112
DM	-1.326759	0.405327	-3.273307	0.0113
Z2	1.565679	1.020753	1.533847	0.1636
C	15.58765	3.751488	4.155059	0.0032
R-squared	0.874306	Mean dependent var	1.562035	
Adjusted R-squared	0.780036	S.D. dependent var	0.854159	
S.E. of regression	0.400603	Akaike info criterion	1.313033	
Sum squared resid	1.283862	Schwarz criterion	1.643456	
Log likelihood	-2.847745	F-statistic	9.274478	
Durbin-Watson stat	1.948391	Prob(F-statistic)	0.003031	

Lampiran VI. Hasil Uji LM untuk mendeteksi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.248244	Probability	0.786757
Obs*R-squared	0.993440	Probability	0.608523

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/18/06 Time: 07:32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.090255	0.307135	0.293862	0.7774
LOG(X2)	0.010388	0.431396	0.024080	0.9815
LOG(X3)	0.118553	1.238216	0.095745	0.9264
LOG(X4)	0.025257	0.161421	0.156466	0.8801
DM	0.026972	0.420611	0.064127	0.9507
C	-1.192425	6.052470	-0.197015	0.8494
RESID(-1)	-0.228448	0.575794	-0.396753	0.7034
RESID(-2)	-0.238566	0.486692	-0.490179	0.6390
R-squared	0.066229	Mean dependent var	-7.11E-16	
Adjusted R-squared	-0.867541	S.D. dependent var	0.344490	
S.E. of regression	0.470773	Akaike info criterion	1.635646	
Sum squared resid	1.551392	Schwarz criterion	2.013273	
Log likelihood	-4.267347	F-statistic	0.070927	
Durbin-Watson stat	1.978979	Prob(F-statistic)	0.998780	

Lampiran VII. Hasil Uji White untuk mendeteksi heterokedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.775114	Probability	0.652139
Obs*R-squared	8.737488	Probability	0.461851

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 07/16/06 Time: 00:39
 Sample: 1988 2002
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.368705	16.19090	0.393351	0.7103
LOG(X1)	1.008046	2.272986	0.443490	0.6759
(LOG(X1))^2	0.064166	0.208319	0.308016	0.7705
LOG(X2)	1.030561	0.901156	1.143599	0.3046
(LOG(X2))^2	-0.471834	0.385705	-1.223301	0.2757
LOG(X3)	4.611320	5.277388	0.873788	0.4222
(LOG(X3))^2	-0.831401	0.915432	-0.908206	0.4054
LOG(X4)	0.446096	1.005616	0.443605	0.6759
(LOG(X4))^2	-0.014735	0.033501	-0.439837	0.6784
DM	0.223702	0.267894	0.835039	0.4418
R-squared	0.582499	Mean dependent var	0.110762	
Adjusted R-squared	-0.169002	S.D. dependent var	0.120433	
S.E. of regression	0.130213	Akaike info criterion	-1.004574	
Sum squared resid	0.084777	Schwarz criterion	-0.532541	
Log likelihood	17.53431	F-statistic	0.775114	
Durbin-Watson stat	2.578044	Prob(F-statistic)	0.652139	

Lampiran VIII. Hasil Uji Klien untuk mendeteksi multikolinearitas

X1 dan X2

Dependent Variable: LOG(X1)
 Method: Least Squares
 Date: 07/16/06 Time: 00:40
 Sample: 1988 2002
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X2)	-0.255804	0.230396	-1.110278	0.2870
C	5.839355	0.298274	19.57716	0.0000
R-squared	0.086611	Mean dependent var	5.558002	
Adjusted R-squared	0.016351	S.D. dependent var	0.614369	
S.E. of regression	0.609326	Akaike info criterion	1.970639	
Sum squared resid	4.826613	Schwarz criterion	2.065045	
Log likelihood	-12.77979	F-statistic	1.232716	
Durbin-Watson stat	1.014610	Prob(F-statistic)	0.286994	

X1 DAN X3

Dependent Variable: LOG(X1)
Method: Least Squares
Date: 07/18/06 Time: 07:18
Sample: 1988 2002
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X3)	-1.319189	0.789085	-1.671796	0.1184
C	9.319142	2.254711	4.133186	0.0012
R-squared	0.176950	Mean dependent var	5.558002	
Adjusted R-squared	0.113638	S.D. dependent var	0.614369	
S.E. of regression	0.578409	Akaike info criterion	1.866495	
Sum squared resid	4.349240	Schwarz criterion	1.960901	
Log likelihood	-11.99871	F-statistic	2.794903	
Durbin-Watson stat	0.887900	Prob(F-statistic)	0.118447	

X1 DAN X4

Dependent Variable: LOG(X1)
Method: Least Squares
Date: 07/16/06 Time: 00:42
Sample: 1988 2002
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X4)	0.052382	0.130193	0.402345	0.6940
C	6.239112	1.700737	3.668476	0.0028
R-squared	0.012299	Mean dependent var	5.558002	
Adjusted R-squared	0.063678	S.D. dependent var	0.614369	
S.E. of regression	0.633628	Akaike info criterion	2.048857	
Sum squared resid	5.219301	Schwarz criterion	2.143264	
Log likelihood	-13.36643	F-statistic	0.161882	
Durbin-Watson stat	0.923761	Prob(F-statistic)	0.693967	

X1 DAN DM

Dependent Variable: LOG(X1)
Method: Least Squares
Date: 07/18/06 Time: 07:19
Sample: 1988 2002
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DM	-0.476582	0.308935	-1.542661	0.1469
C	5.748635	0.195388	29.42171	0.0000
R-squared	0.154736	Mean dependent var		5.558002
Adjusted R-squared	0.089715	S.D. dependent var		0.614369
S.E. of regression	0.586163	Akaike info criterion		1.893127
Sum squared resid	4.466625	Schwarz criterion		1.987533
Log likelihood	-12.19845	F-statistic		2.379804
Durbin-Watson stat	1.141398	Prob(F-statistic)		0.146898

X2 DAN X3

Dependent Variable: LOG(X2)
Method: Least Squares
Date: 07/18/06 Time: 07:22
Sample: 1988 2002
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X3)	1.233762	0.940346	1.312029	0.2122
C	-2.417701	2.686922	-0.899803	0.3846
R-squared	0.116933	Mean dependent var		1.099877
Adjusted R-squared	0.049005	S.D. dependent var		0.706822
S.E. of regression	0.689285	Akaike info criterion		2.217243
Sum squared resid	6.176486	Schwarz criterion		2.311650
Log likelihood	-14.62932	F-statistic		1.721421
Durbin-Watson stat	1.688751	Prob(F-statistic)		0.212206

X2 DAN X4

Dependent Variable: LOG(X2)
Method: Least Squares
Date: 07/18/06 Time: 07:23
Sample: 1988 2002
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X4)	0.267471	0.131193	2.038761	0.0623
C	-2.377959	1.713806	-1.387531	0.1886
R-squared	0.242272	Mean dependent var		1.099877
Adjusted R-squared	0.183985	S.D. dependent var		0.706822
S.E. of regression	0.638497	Akaike info criterion		2.064167
Sum squared resid	5.299823	Schwarz criterion		2.158574
Log likelihood	-13.48125	F-statistic		4.156544
Durbin-Watson stat	1.279078	Prob(F-statistic)		0.062347

X2 DAN DM

Dependent Variable: LOG(X2)
Method: Least Squares
Date: 07/18/06 Time: 07:24
Sample: 1988 2002
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DM	0.964239	0.279164	3.454029	0.0043
C	0.714181	0.176559	4.045011	0.0014
R-squared	0.478547	Mean dependent var		1.099877
Adjusted R-squared	0.438435	S.D. dependent var		0.706822
S.E. of regression	0.529676	Akaike info criterion		1.690462
Sum squared resid	3.647232	Schwarz criterion		1.784869
Log likelihood	-10.67846	F-statistic		11.93032
Durbin-Watson stat	2.761034	Prob(F-statistic)		0.004275

X4 DAN DM

Dependent Variable: LOG(X4)

Method: Least Squares

Date: 07/16/06 Time: 00:52

Sample: 1988 2002

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DM	0.443765	0.618686	0.717271	0.4859
C	2.064363	0.225912	9.137902	0.0000
R-squared	0.038069	Mean dependent var		2.123532
Adjusted R-squared	-0.035926	S.D. dependent var		0.800289
S.E. of regression	0.814538	Akaike info criterion		2.551174
Sum squared resid	8.625134	Schwarz criterion		2.645581
Log likelihood	-17.13381	F-statistic		0.514477
Durbin-Watson stat	2.441194	Prob(F-statistic)		0.485896

